KOLONIALISME ZIONIS DI PALESTINA

Fayez A. Sayegh

Kata Pengantar:

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

KOLONIALISME ZIONIS DI PALESTINA

Judul asli: *Zionist Colonialism in Palestine*.
Diterbitkan pertama kali oleh Research Center Palestine Liberation Organization Beirut, Lebanon, September 1965.

INDOPROGRESS

Pengarang : Fayez A. Sayegh
Penerjemah : Azhar Irfansyah
Editor : Coen Husain Pontoh
Desain sampul dan isi : Rinto Pangaribuan
Penerbit : Pustaka IndoPROGRESS, 2021

Daftar Isi

2 Perspektif Kiri untuk Solidaritas Palestina

27 Pendahuluan

30 Latar Belakang Sejarah Kolonialisme Zionis

46 Persekutuan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis

63 Karakter Negara-Pemukim Zionis

92 Respons Rakyat Palestina: Dari Perlawanan ke Pembebasan

114 Biodata

Perspektif Kiri untuk Solidaritas Palestina

Ahmad Rizky M. Umar

"Nasib Palestina, dengan demikian, mewakili 'anomali', sesuatu yang berbeda secara radikal dari tren sejarah dunia kontemporer. Banyak bangsa dan orang-orang telah dapat menikmati hak untuk menentukan nasibnya sendiri, di saat yang bersamaan orang-orang Arab Palestina menemukan diri mereka dalam keadaan tak berdaya dalam menghalangi puncak dari proses penjajahan sistemik terhadap negerinya yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun."

(Fayez Sayegh, 1965: (27-28))

I

Selama ini, cara pandang kita di Indonesia tentang solidaritas Palestina banyak diisi oleh cara pandang 'Islamis' – melihat perjuangan rakyat Palestina sebagai perwujudan umat Islam yang tertindas melawan Zionisme Israel. Terkadang cara pandang itu juga bersinggungan dengan pandangan-pandangan anti-Yahudi, yang banyak diwariskan sejak masa sebelum Perang Dunia II dalam wujud teori-teori konspirasi yang tersebar luas. Dari cara pandang seperti itu, yang sering dilihat dalam perjuangan rakyat Palestina adalah perlawanan pejuang-pejuang Hamas di Jalur Gaza, dan membuat kita sering mengidentikkan perjuangan Palestina dengan anggota Brigade Al-Qassam yang dicitrakan saleh, punya hafalan Qur'an, taat beribadah, dan tak lupa taat pada pemimpin.

Setidaknya itulah citraan tentang perjuangan rakyat Palestina yang dulu saya terima semasa masih sering ikut demonstrasi Palestina

yang digelar aktivis Jamaah Tarbiyah dan organisasi-organisasi sayapnya. Masa itu, perjuangan Palestina sangat identik dengan aktivisme Islam dan artikulasi politik Islam dalam politik global. Tentu hal ini tidak keliru. Semangat perjuangan Palestina, setidaknya dalam perspektif Hamas dan beberapa organisasi politik Islam di Palestina, adalah perjuangan global umat Islam dan perlawanan terhadap Zionisme digelorakan melalui semboyan-semboyan Pan-Islamisme. Pendudukan atas Palestina di tahun 1948 –*Nakba*—adalah pendudukan atas tanah suci yang dihormati oleh umat Islam secara historis.

Namun, setelah belajar tentang politik Timur Tengah secara lebih lama dan detil, saya tersadar dengan satu hal: sejarah perjuangan Palestina bukan sekadar soal agama. Sentimen agama memang penting bagi pemupuk perjuangan, tapi ada aspek dan ideologi politik lain yang juga menginginkan pembebasan Palestina dari kolonialisme Israel. Jika membaca buku *Falsa-*

fah Ats-Tsawrah ("Filsafat Pembebasan") yang ditulis oleh pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser, kita akan disadarkan juga bahwa Palestina adalah bagian penting dari semangat nasionalisme Arab yang melatarbelakangi perlawanan negara-negara Arab di tahun 1950an-1960an. Gerakan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (*Jabhah Sya'biyyah li al-Tahrir Filistin/PFLP*) –organisasi kiri terbesar di Palestina yang masih eksis hingga sekarang— juga punya peran yang tidak sedikit dalam melawan pendudukan Israel –salah satunya memperkenalkan strategi bom bunuh diri yang kemudian diadopsi gerakan lain, termasuk Hamas.

Perlawanan juga tidak hanya dilakukan di dalam Palestina sendiri. Di Israel sendiri, ada koalisi partai kiri dan Arab *Hadash,* yang getol memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Aktivis-aktivis Palestina bergerak di luar negeri, bersolidaritas dengan tokoh-tokoh Yahudi yang menolak pendudukan Israel, untuk mem-

perjuangkan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sejarah perlawanan Palestina, dengan kata lain, adalah sejarah perlawanan orang-orang tertindas melawan penjajahan Israel yang masih terjadi hingga kini.

Buku Dr. Fayez Sayegh, diplomat senior dan salah satu tokoh Palestina di Pengasingan yang berjudul "Kolonialisme Zionis di Palestina" adalah salah satu karya yang memotret kompleksnya perjuangan perlawanan rakyat Palestina sejak dulu. Diterbitkan oleh Puslitbang Organisasi Pembebasan Palestina (dikenal juga dengan *Fatah*), Dr. Sayegh memotret sejarah perlawanan Palestina sebagai sejarah perlawanan anti-kolonialisme global. Ia melihat penduduk-an Palestina sebagai 'anomali' dari sejarah global tahun 1960an yang masa itu diwarnai oleh dekolonisasi di Asia dan Afrika –hasil konkret dari Konferensi Bandung tahun 1955.

Buku Dr. Sayegh memberikan kita alternatif cara pandang untuk memahami perjuangan per-

lawanan rakyat Palestina. Ia bukan hanya sekadar ekspresi umat Islam yang disingkirkan dari tanah suci tempat berdirinya Masjid Al-Aqsha. Ia juga adalah ekspresi orang-orang tak berdaya yang disingkirkan dari rumah yang mereka diami selama bertahun-tahun oleh penjajah yang menggantikan Inggris. Ia juga adalah ekspresi perjuangan orang-orang miskin tak berpunya –para pekerja yang tak sempat menikmati hasil jerih payah mereka sendiri karena tidak punya hak legal untuk menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Sejak pendudukan pertama di tahun 1948 –*Nakbah*— orang-orang Palestina terusir ke luar negeri dan menjadi 'diaspora' dan pengungsi tanpa negara. Mereka tak bisa kembali ke tanah mereka karena tanah mereka dikuasai oleh kaum yang mengontrol siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak.

Itulah potret dari penjajahan Zionisme, yang dikritik dan dikupas secara mendalam oleh Dr Sayegh di bukunya ini.

II

Sebelum saya merangkum dan mengantarkan pembahasan di buku Dr. Sayegh, mungkin perlu diketengahkan terlebih dulu siapa itu Dr. Fayez A. Sayegh. Sebagaimana dikutip dari beberapa sumber, Fayez Abdullah Sayegh lahir di tahun 1922 di Kharraba, Syria, dari sebuah keluarga pendeta Presbysterian berkebangsaan Palestina dan dibesarkan di pinggir Danau Tiberias, yang dulunya adalah bagian dari wilayah Palestina. Belajar di Universitas Amerika di Beirut dan kemudian pindah ke Amerika Serikat, ia kemudian menamatkan studi Doktoral di Universitas Georgetown, dalam bidang kajian Filsafat dan Ilmu Politik, lalu mengajar di beberapa kampus di Amerika Serikat.

Sejak tahun 1965, Dr. Sayegh menjadi anggota dari Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta mendirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan PLO di Beirut. Setelah bermigrasi ke AS, ia kemudian menge-

palai kantor Liga Arab di Washington DC dari tahun 1970-1974, dan terlibat banyak dalam diplomasi pembebasan Palestina di Amerika Serikat. Dalam kapasitas itu, ia menjadi penasehat senior dari Perwakilan Tetap Kuwait, Yaman dan Lebanon untuk PBB, serta menjadi pemantau tetap Liga Arab di PBB. Buku *Kolonialisme Zionis di Palestina* adalah salah satu dari beberapa karya monumentalnya.

Namun jasanya yang paling besar dalam diplomasi pembebasan Palestina adalah ketika beliau –dalam kapasitas sebagai delegasi dari Kuwait— menulis satu rancangan Resolusi Majelis Umum PBB yang menempatkan Zionisme sebagai bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Resolusi ini adalah salah satu capaian progresif dari negara-negara Arab untuk memperlihatkan karakter pendudukan Israel di Palestina sebagai bentuk diskriminasi rasial. Rancangan Resolusi ini kemudian diterima dan diadopsi menjadi Resolusi A/RES/3379 (XXX) –disebut juga dengan

Resolusi 3379— kendati mendapatkan penolakan dari Amerika Serikat, Prancis, dan Israel.

Untunglah Majelis Umum PBB tidak mengenal veto, sehingga keputusan tersebut tidak bisa dianulir melalui kekuatan yang tidak seimbang. Resolusi ini lahir dengan dukungan negara-negara komunis dan negara Dunia Ketiga. Syahdan, Resolusi tersebut dibatalkan pada tahun 1991 sebagai bagian dari negosiasi damai antara Fatah dan Israel, yang kemudian berujung pada Persetujuan Oslo tahun 1993.

Resolusi Majelis Umum No. 3379 tersebut punya konsiderans yang cukup singkat. Dengan mengacu pada Resolusi 1904 tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi rasial, dan beberapa deklarasi lain yang terkait, Resolusi tersebut secara ringkas menyatakan bahwa zionisme adalah bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Resolusi ini lahir dengan dukungan yang cukup intens dari negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB), yang dalam banyak

hal memang sangat menaruh perhatian terhadap gerakan-gerakan pembebasan di berbagai belahan dunia. Dipimpin oleh Josip Broz Tito, Pemimpin Yugoslavia, gerakan ini mendorong hasil-hasil Konferensi Bandung –termasuk klausul tentang persamaan ras— dan memformalkannya menjadi sebuah gerakan alternatif di tengah hebatnya Perang Dingin.

Perlu untuk dilihat bahwa masa itu, gagasan tentang 'persamaan ras' adalah gagasan yang baru di dunia barat. Tahun 1960, negara-negara Dunia Ketiga berdebat panas dengan negara barat karena negara-negara barat tidak mau mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri bagi negara-negara yang berada di bawah penjajahan. Dipimpin oleh Indonesia, India, Ghana, Mesir, dan Yugoslavia, perdebatan berakhir dengan voting yang dimenangkan oleh negara-negara Dunia Ketiga, dan penjajahan secara legal berakhir sejak itu (meski berubah dalam bentuk yang baru kemudian). Tahun 1963, koalisi ne-

gara Dunia Ketiga ini berhasil mendorong ide persamaan ras –yang sudah dirumuskan di Konferensi Bandung tahun 1955—di Majelis Umum PBB ke dalam Resolusi 1905. Dalam banyak hal, apa yang dirumuskan di Resolusi 3379 adalah lanjutan dari perjuangan yang sudah terbangun sebelumnya dalam politik internasional.

Dr Fayez Sayegh meninggal di Amerika Serikat pada tahun 1980. Beliau menunjukkan bahwa perjuangan diplomasi, aktivisme politik, dan pergulatan akademik sejatinya adalah satu front perjuangan. Sebagai akademisi, ia menulis karya-karya yang cukup bagus: tentang pengungsi Palestina (1952), Konflik Arab-Israel (1956), Komunisme di Israel (1958), dan yang cukup terkenal, Kolonialisme Zionis di Palestina (1965). Buku yang terakhir memberikan kita *insight* historis tentang pendudukan dan kolonialisme Israel di Palestina, dan setidaknya memberikan kita acuan tentang pentingnya bersolidaritas terhadap rakyat Palestina tanpa harus

menyempitkannya menjadi sekadar politik agama.

III

Naskah *Kolonialisme Zionis di Palestina* pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Pusat Penelitian PLO di Beirut. Sebagai buku, ia cukup tipis: hanya berisi 52 halaman ditambah lampiran beberapa deklarasi penting yang mendukung argumennya dari Konferensi Bandung, Beograd, hingga Konferensi Gerakan Non-Blok kedua di Kairo. Buku ini terdiri dari 4 bab yang secara gamblang memberikan pembaca gambaran tentang asal-usul dan karakter kolonialisme zionis di Palestina.

Sayegh melacak asal-usul Zionisme dari pemisahan negara-negara Afrika tahun 1880an, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek kolonialisme global Eropa. Masa itu adalah masa yang disebut oleh Cemil Aydin sebagai masa 'imperialisme tinggi': masa dimana im-

perialisme dan kolonialisme adalah norma yang mengatur praktik politik internasional, terutama di Eropa. Di Afrika, keberadaan negara-negara Eropa berubah: dari yang awalnya mengirimkan budak-budak ke Amerika dan Karibia, kemudian berdagang, dan di akhir abad ke-19 mereka semua berlomba untuk memperluas kekuasaan mereka di kawasan yang baru mereka huni atau mereka taklukkan.

Masa itu, semua negara Eropa punya kepentingan untuk memperluas koloni mereka di Asia dan Afrika. Politikus dan industrialis konservatif Inggris memperluas jajahan mereka di Afrika Selatan dan Barat. Prancis mempertahankan kekuasaan mereka di negara-negara Afrika Barat dan Timur, meskipun dengan posisi yang cukup melemah di Eropa. Raja Leopold II dari Belgia mendirikan 'Negara Bebas Kongo'. Di bawah Kanselir tangan besi Otto von Bismarck, Jerman mendorong ekspansi kekuasaan mereka di Afrika selatan dan tengah. Negara-negara ini saling

bertarung dan memperluas kekuasaannya, mendesak kekuasaan Kesultanan Usmani dan Ethiopia yang melemah.

Di tengah-tengah kecamuk perebutan kuasa itu, muncul gerakan Zionisme. Dipimpin beberapa intelektual dan aktivis, mereka mulai memperkuat lobi-lobi di Eropa dan memanfaatkan lemahnya Kesultanan Usmani. Di bawah pimpinan Theodore Herzl, mereka berkumpul di Basel dan mengumandangkan satu slogan, sebagaimana dikutip oleh Dr. Sayegh, "Tujuan Zionisme adalah membuatkan rumah untuk orang-orang Yahudi di Palestina, yang dijamin oleh hukum publik" (h. 34). Karena sifat gerakan Zionisme yang mendompleng kolonialisme Eropa, Sayegh sampai pada kesimpulan: kolonialisme, bagi Zionisme, adalah instrumen untuk membangun negara baru, dan bukan sebuah upaya untuk membentuk nasionalisme.

Artinya: zionisme bukan gerakan nasionalisme yang melawan kolonialisme; ia justru me-

manfaatkannya demi mewujudkan tujuan kolonialisme yang lebih baru.

Ada fakta lain yang jadi sorotan Sayegh: persekutuan tidak suci antara imperialisme Inggris dan kolonialisme Zionis. Konteks globalnya adalah Perang Dunia I. Ketika Turki Usmani ikut Perang Dunia I dengan Blok Tengah, aktivis Zionis segera mencari haluan baru dengan mendekat dengan Inggris. Lobi-lobi di kabinet digencarkan. Tahun 1917, Menlu Inggris Arthur Balfour mengajukan dukungan untuk memberikan rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina, tanah yang secara administratif masa itu diperebutkan oleh Inggris dan Usmani. Di saat yang bersamaan, perwira militer Inggris Mark Sykes dan diplomat Prancis Francois Georges-Picot melakukan perjanjian rahasia untuk membagi bekas wilayah Usmani ke teritori mereka seandainya Turki Usmani kalah di Perang Dunia I.

Syahdan, Turki dan Blok Sentral benar-benar kalah di Perang Dunia I. Perjanjian Sykes-Picot menjadi dasar bagi negara-negara sekutu untuk membagi Timur Tengah ke dalam wilayah protektorat Eropa: Syria dan Lebanon masuk dalam protektorat Prancis, sementara Inggris menjamin wilayah seperti Irak, Yaman, dan Palestina. Migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina mulai marak, kali ini dengan jaminan Inggris. Negara-negara Eropa melegalkan penjajahan ini melalui Liga Bangsa-bangsa. Hal ini mengantarkan Sayegh pada kesimpulannya yang kedua: karakter kolonialisme di Palestina adalah kolonialisme pendatang yang dijamin melalui persekutuan antara kolonialisme Zionis dengan Imperialisme Inggris.

Masalah muncul ketika kemudian terjadi Perang Dunia II, orang-orang Yahudi jadi korban *Holocaust* di Eropa, dan geliat Nasionalisme Arab mulai muncul. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan konservatif dan pro-kolonial

Inggris Ellie Kedourie, nasionalisme Arab dalam banyak hal difasilitasi oleh Inggris dan Prancis yang ingin memberikan ruang yang lebih terbuka bagi raja-raja kecil di Arab untuk memperluas kekuasaannya. Dampaknya adalah opresi terhadap minoritas (termasuk Yahudi) di beberapa negara Arab terutama setelah Perang Dunia II –seperti di Irak atau Yaman. *Holocaust,* di sisi lain, menuntut negara-negara Eropa untuk memindahkan minoritas Yahudi di Eropa ke tempat lain.

Hal ini memberikan justifikasi untuk migrasi yang lebih besar ke tanah Palestina. Ditopang oleh kelompok paramiliter yang berafiliasi –dan didukung oleh gerakan Zionisme internasional—kelompok Zionisme mulai melancarkan aksi-aksi untuk memuluskan perpindahan penduduk ke Palestina. Migrasi ke tanah Palestina bukan masalah mudah. Ada konsekuensi rivalitas dan konflik agama yang sewaktu-waktu bisa muncul, dan jadi sangat laten. Organisasi para-

militer seperti Irgun dan Haganah muncul untuk membela kepentingan pendatang.

Rivalitas meningkat setelah Perang Dunia II: dengan kekuatan mereka yang dirasa cukup, aktivis Zionis mendeklarasikan negara Israel di tanah Palestina –yang waktu itu masih berada di bawah Mandat Inggris—dan melahirkan Perang Arab-Israel. Kolonialisme Zionis akhirnya benar-benar terbentuk setelah Perang Arab-Israel dengan berdirinya negara Israel.

Di sinilah kemudian Sayegh mengidentifikasi tiga karakter utama kolonialisme Zionis di Palestina: (1) rasisme; (2) kekerasan dan teror; dan (3) perluasan teritori. Ketiga hal ini tak terpisahkan dalam kolonialisme Zionis. Bagi Sayegh, rasisme adalah bagian yang tak terpisahkan dari kolonialisme Zionis. Sebagai contoh, sejak akhir abad ke-19, Theodore Herzl dan Chaim Weizmann dan telah memproyeksikan rencana untuk menguasai total Palestina dan menjadikan mereka sebagai tanah air orang-orang Ya-

hudi. Rencana ini berdiri di atas satu ideologi utama: supremasi orang-orang Yahudi pendatang atas orang-orang "Arab Asli", dengan cara mengisolasi orang-orang Arab dari tanah mereka dan memperluas hunian Yahudi.

Pandangan rasis ini bertumpu pada strategi teror dan kekerasan, yang awal mulanya dilakukan melalui kelompok paramiliter dan kini berkembang dalam bentuk Tentara Pertahanan Israel dan aparatus intelijennya. Terakhir, Sayegh berargumen bahwa perluasan teritori dan pemukiman Yahudi adalah bagian tak terpisahkan atas kolonialisme Zionis, yang terjadi sampai sekarang –terakhir dengan penggusuran atas orang-orang Arab Palestina yang tinggal di hunian Syeikh Jarrah di Yerusalem Timur.

Lantas, bagaimana kita memahami perlawanan orang-orang Palestina atas kolonialisme itu? Sayegh menjelaskannya di Bab terakhir bukunya. Menurut Sayegh, perlawanan rakyat Palestina atas kolonialisme Zionis ini dilakukan

dalam 5 tahap. Tahap pertama, orang-orang Arab Palestina menganggap orang-orang Yahudi pendatang awalnya sebagai 'peziarah' atas tanah mereka yang hilang. Baru ketika gerakan Zionis baru berkembang di awal abad ke-20, mereka mulai bereaksi terhadap pendatang dan perampas lahan mereka. Situasi tidak berpihak pada mereka ketika Turki Usmani kalah di Perang Dunia I, dan perlawanan mereka semakin intens ketika Palestina dicaplok menjadi Mandat Inggris.

Puncaknya, orang-orang Palestina terusir ketika pendudukan *Nakbah* pertama di tahun 1948, yang berakhir dengan kalahnya negara-negara Arab di tangan Israel. Mereka berjuang dengan aktivisme transnasional dan perlawanan bersenjata melawan Israel hingga saat ini.

IV

Dr. Fayez Sayegh meninggal sebelum menyaksikan hasil pekerjaannya dibalikkan oleh elite PLO di Deklarasi Oslo, yang memungkinkan adanya "Otoritas Palestina" di tanah yang tidak sepenuhnya merdeka dari kolonialisme Israel. Pada tahun 1982 –dua tahun setelah beliau meninggal— lembaga yang dibentuknya, Pusat Penelitian PLO, tertahan aktivitas-aktivitasnya dan tidak bisa beroperasi karena serangan Israel ke Lebanon. Tentara Israel membombardir kantor Pusat Penelitian PLO di Beirut dan membakar naskah-naskah yang tak terselamatkan. Beruntung banyak buku beliau –termasuk buku yang Anda baca ini—yang masih utuh.

Hari ini, PLO masih beroperasi dan mengontrol kawasan Tepi Barat atas restu Israel. Namun haluannya tidak seradikal dulu. Sepeninggal Yasser Arafat, wakilnya Mahmoud Abbas –Abu Mazen—bernegosiasi dengan Israel dan akhirnya mendapatkan teritori yang dikontrol Israel,

wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Lawan beratnya, Hamas, menolak untuk tunduk. Setelah sempat membentuk pemerintahan bersama, Hamas menang Pemilu di tahun 2006 dan menguasai Jalur Gaza. Konflik meruncing, dan dimanfaatkan oleh penjajah Zionis untuk mengadu domba kelompok pejuang kemerdekaan yang sebetulnya punya tujuan yang sama: memerdekakan Palestina.

Tapi angan-angan untuk Palestina merdeka tetap ada. Mereka hidup dalam realitas rakyat Palestina, baik yang ada di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, di penjara-penjara Israel, maupun yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan mereka tidak sekadar dibatasi oleh sekat etnis, agama, ataupun sekadar oleh simbol organisasi. Mereka bersatu-padu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dr. Fayez Sayegh atau Edward Said yang Kristen punya visi yang sama dengan Muslim taat seperti Khaled Meshaal atau Abu Mazen.

Sebab, sejarah perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel, sejatinya, adalah perlawanan rakyat tertindas melawan penjajah. Perlawanan orang-orang yang terusir untuk kembali ke lahan mereka secara damai.

Di titik inilah, solidaritas gerakan kiri Indonesia pada Palestina kita tempatkan. Karena sejarah perlawanan rakyat Palestina, menurut Dr. Sayegh, adalah perlawanan terhadap kolonialisme Zionis, kita jangan salah fokus. Solidaritas kita bukan solidaritas anti-Yahudi atau semata solidaritas kepada gerakan tertentu ketika Israel menyerang Sheikh Jarrah dan Jalur Gaza. Solidaritas tetap harus kita suarakan, pada siapapun yang melawan pendudukan Israel. Kita tak perlu mendengarkan orang-orang yang setengah hati membela Israel sembari menutup mata pada penjajahan yang terjadi di Palestina selama ini.

Di sini, perspektif kiri atas solidaritas Palestina menjadi jelas dan terang-benderang: solidaritas untuk melawan penjajahan. Yang sudah ter-

jadi, dan masih terus terjadi, di tanah Palestina. Dan untuk itulah narasi dan wacana solidaritas mesti kita bangun. Di media sosial, di aksi-aksi jalanan, di lingkungan kita. Karena, sebagaimana kata mbah Karl Marx dan Friedrich Engels, bukankah sejarah perjuangan hidup manusia adalah juga sejarah perjuangan kelas yang tertindas?

"Sebagai sebuah masalah kolonial, yang secara aneh berkembang tepat ketika kolonialisme mulai memudar dan ditinggalkan, problem Palestina adalah tantangan terhadap semua rakyat Asia dan Afrika yang tidak setuju dengan kolonialisme. Karena, sebagai sebuah analisis terakhir, sebab dari gerakan anti-kolonialisme dan pembebasan sejatinya adalah satu dan tak terpisahkan."

(Fayez Sayegh, 1965: 51).

Daftar Pustaka

Cemil Aydin, *The politics of anti-westernism in Asia*. Columbia University Press, 2007.

Elie Kedourie, *England and the Middle East*. London, Bowes, 1956.

Fayez Sayegh, *Zionist Colonialism in Palestine*. Beirut: Research Centre, Palestine Liberation Organization, 1965.

Resolution Adopted by the General Assembly 3379 (XXX), Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Archived at https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1

Karl Marx dan Frederich Engels, *Manifesto Partai Komunis*.

**) Penulis adalah Mahasiswa Doktoral tingkat akhir di Universitas Queensland, Australia, meneliti tentang Gerakan Islam, Sejarah Antikolonialisme Global, serta Sejarah Asia dalam Politik Internasional.*

Pendahuluan

Dalam dua dekade belakangan (pra-1965-ed.), kita telah menyaksikan keruntuhan imperialisme Eropa dan penghapusan yang cepat dari Kolonialisme Barat di Asia dan Afrika. Beriringan dengannya kita saksikan pula bentuk kolonialisme baru diperkenalkan di titik persimpangan dua benua. Dengan demikian, memudarnya satu babak yang kejam dan memalukan terjadi bersamaan dengan munculnya, di wilayah yang menjembatani Asia dan Afrika, percabangan baru imperialisme Eropa dan suatu ragam baru dari kolonialisme rasis.

Nasib Palestina, dengan demikian, mewakili suatu penyimpangan (*anomaly*), sesuatu yang

berbeda secara radikal dari tren sejarah dunia kontemporer. Banyak bangsa dan orang-orang telah dapat menikmati hak untuk menentukan nasibnya sendiri, di saat yang bersamaan orang-orang Arab Palestina menemukan diri mereka dalam keadaan tak berdaya dalam menghalangi puncak dari proses penjajahan sistemik terhadap negerinya yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Puncak dari perkembangan ini merupakan paduan dari perampasan paksa terhadap penduduk pribumi, diusirnya mereka dari negerinya sendiri, dicangkokkannya kedaulatan asing di tanah mereka, dan didatangkannya gerombolan orang asing dalam tempo cepat ke negeri yang telah dikosongkan dari pemiliknya itu.

Orang-orang Palestina telah kehilangan bukan hanya kontrol politik terhadap negerinya, tapi juga *pendudukan fisik* di negerinya: mereka telah dirampas bukan hanya hak asasinya un-

tuk menentukan nasib sendiri, tetapi juga hak mendasarnya untuk berada di negerinya sendiri!

Tragedi ganda ini, yang telah menimpa orang-orang Arab di pertengahan abad 20, menyimbolkan sifat ganda dari program Zionis yang mulai mengungkapkan dirinya di Palestina pada akhir abad 19.

I. Latar Belakang Sejarah Kolonialisme Zionis

Hiruk-pikuk "berebut Afrika" pada 1880-an, telah membuka jalan bagi kolonisasi Zionis di Palestina. Saat orang-orang Eropa pencari kekayaan, bakal pemukim, dan pembangun emporium saling bersaing untuk Afrika, para pemukim Zionis yang bakal menjadi pembangun negara berpacu untuk Palestina.

Di bawah pengaruh kredo Nasionalisme yang kala itu menyapu seluruh Eropa, beberapa orang Yahudi saat itu turut meyakini ikatan keagamaan dan ras di kalangan mereka merupakan ikatan "kebangsaan" Yahudi dan oleh karenanya memberikan hak pada "bangsa Ya-

hudi" sebagaimana hak bangsa-bangsa pada umumnya – termasuk hak untuk *berada secara terpisah* di wilayah yang mereka miliki sendiri, dan hak untuk mendirikan negara Yahudi. Jika bangsa-bangsa Eropa lain telah berhasil memperluas wilayah mereka hingga ke Asia dan Afrika, telah mencaplok sebagian luas dari dua benua tersebut ke dalam wilayah imperialnya, maka "bangsa Yahudi" – begitu pendapat mereka – berhak dan dapat melakukan hal yang sama. Dengan meniru upaya-upaya kolonial dari bangsa-bangsa non-Yahudi yang kaum Yahudi tinggali negerinya, "bangsa Yahudi" dapat mengirim penjajah dari kalangan mereka sendiri ke wilayah Afro-Asia, mendirikan komunitas pemukim, dan, pada gilirannya, mendirikan negaranya sendiri – bukan, tentu saja, sebagai wilayah terluar imperial dari sebuah pusat metropolitan, melainkan sebagai pusatnya dalam pengakuan mereka sendiri, yang di mana seluruh "bangsa Yahudi" dari berbagai belahan du-

nia kemudian cepat atau lambat berkumpul. "Nasionalisme Yahudi" kemudian mewujudkan dirinya sendiri melalui proses kolonisasi, sebagaimana bangsa Eropa lain lakukan untuk membangun imperium. *Bagi Zionisme, maka dari itu, penjajahan adalah instrumen dari pembangunan bangsa, bukan hasil sampingan dari nasionalisme yang telah terwujud*.

Proses improvisasi kolonisasi Yahudi yang kemudian terjadi sukar disebut sebagai keberhasilan spektakuler, meskipun telah didukung pendanaan yang melimpah dari para penyandang dana Yahudi Eropa. Kebanyakan, kaum Yahudi lebih tertarik pada peluang-peluang baru bermigrasi ke Amerika Serikat atau Argentina, ketimbang pada panggilan pemisahan diri rasial sebagai pendahuluan pendirian negara di Palestina. Tujuan untuk *melarikan diri* dari praktik-praktik anti-Yahudi yang berlaku di beberapa masyarakat Eropa dapat dicapai dengan emigrasi ke Amerika; sedang tujuan *pendirian bangsa*

– yang dapat membuat solusi alternatif kolonisasi berskala besar di Palestina jadi lebih menarik – saat itu masih belum tersebar luas di kalangan Yahudi Eropa pada akhir abad 19.

Kegagalan dari upaya sporadis awal untuk memasukkan komunitas pemukim Zionis pada lima belas tahun pertama kolonisasi Zionis (1882-1897), mendorong penilaian kembali yang serius dan perubahan strategi secara radikal. Hal ini dilakukan melalui Kongres Zionis Pertama, yang dihelat di Basle (Basel), Switzerland, pada Agustus 1897 di bawah kepemimpinan Theodor Herzl.

Kolonisasi serampangan terhadap Palestina yang disokong penyandang dana Yahudi kaya sebagai perpaduan upaya filantropis-kolonial, mulai saat itu ditinggalkan. Upaya itu kemudian digantikan dengan kolonisasi terorganisir berdasarkan program yang murni nasionalistis, dengan tujuan politik yang jelas dan dukungan massa. Maka itu tujuan Zionisme secara keselu-

ruhan yang dirumuskan melalui Kongres Basle adalah sebagai berikut: *"Tujuan dari Zionisme adalah untuk membangun rumah bagi orang Yahudi di Palestina yang terjamin oleh hukum publik."*[1]

Penting untuk dicatat bahwa, sejak Program Basle pada 1897 hingga Program Biltmore pada 1942, Zionis lebih memilih eufimisme "rumah" ketimbang istilah yang lebih jelas "negara" yang bakal memunculkan pertentangan dari banyak pihak. Namun, berlawanan dengan yang dijaminkan banyak pihak, Zionis sejak semual memang bertujuan menciptakan negara-*pemukim* di Palestina. Terkait kesimpulan Kongres Basle, Herzl menulis dalam buku hariannya: "Jika aku menyimpulkan Kongres Basle secara singkat – yang harusnya tidak saya lakukan secara terbuka – akan berbunyi begini: di Basle aku te-

---

1 Cohen, Israel, *A Short History of Zionism,* London, Frederick Muller Co., 1951, p. 47.

lah mendirikan negara Yahudi. Jika aku mengatakannya sekarang maka aku bakal ditertawakan oleh seluruh dunia. Dalam lima tahun ke depan, mungkin, atau pastinya dalam 50 tahun ke depan, setiap orang akan melihatnya."[2]

Sebagai tambahan untuk mendefinisikan tujuan pamungkas Zionisme, Kongres Basle membuat diagnosa karakter dan keadaan khusus kolonisasi Zionis di Palestina, dan merumuskan program praktis yang sesuai dengan kondisi khusus tersebut. Tiga fitur esensial yang secara khas membedakan kolonisasi Zionis di Palestina dan kolonisasi Eropa di wilayah lain Asia-Afrika, dan seruan untuk pembaruan Zionis:

1. Pemukim-pemukim Eropa lain yang telah (atau sedang) mendatangi berbagai wilayah di Asia dan Afrika didorong oleh alas-

---

2 Herzl, Theodor, *Tage Backer,* Vol. II, p. 24; quoted in Cohen, Israel, *A short History of Zionism,* op. cit., pp. 11 and 47-48.

an ekonomi atau politik-imperialis: mereka berangkat baik oleh dorongan untuk menghimpun kekayaan melalui eksploitasi sumber daya alam yang melimpah-ruah dengan hak-hak istimewa dan terproteksi, atau untuk mempersiapkan suatu lahan (atau menjadi kaki tangan) untuk proses pencaplokan suatu wilayah yang diinginkan pemerintah-pemerintah imperial Eropa. Pemukim Zionis, di sisi lain, tidak digerakkan oleh dua macam dorongan ini. Mereka terdorong untuk melakukan kolonisasi Palestina untuk *mendapatkan status kebangsaan* untuk diri mereka sendiri, dan untuk mendirikan negara Yahudi yang akan menjadi negara merdeka dari pemerintah-pemerintah yang ada dan tidak akan menjadi bawahan dari siapapun, dan yang pada saatnya akan menarik para Yahudi seluruh dunia.

2. Pemukim Eropa lain dapat hidup berdampingan dengan penduduk pribumi – yang

mereka eksploitasi dan dominasi, namun demikian pelayanannya tetap mereka butuhkan, dan yang mana keberlanjutan keberadaannya di wilayah yang diinginkan dapat ditolerir. Tapi para pemukim Zionis tidak menerima hidup berdampingan tanpa batas dengan penduduk Palestina. Hal ini karena Palestina telah penuh dihuni oleh orang-orang Arab, yang kesadaran kebangsaannya telah terbangun, dan yang telah menumbuhkan aspirasi kemerdekaan dan perwujudan bangsa. Kolonisasi Zionis mengambil *proporsi fisik* yang telah dicita-citakan oleh Zionisme ketika sebagian Arab Palestina tetap tinggal di kampung halamannya; selain itu, cita-cita pemisahan diri rasial dan kenegaraan tidak mungkin tercapai jika orang-orang Arab yang sadar kebangsaan tetap berada di negeri itu. Itu sebabnya, tidak seperti kolonisasi Eropa di tempat lain, kolonisasi Zionis di Palesti-

na pada dasarnya tidak dapat didamaikan jika keberadaan "penduduk asli" di negeri tersebut tetap ditolerir.

3. Pemukim-pemukim Eropa lain dapat, tanpa kesulitan berarti, mengatasi rintangan yang menghalangi pemukiman mereka di wilayah target yang sudah mereka pilih: mereka dapat bergantung pada penerimaan perlindungan yang mumpuni dari sponsor imperialnya. Tapi bakal pemukim Zionis di Palestina tidak dapat bergantung pada bantuan semacam itu. Lantaran, selain dari Arab Palestina yang pastinya akan menentang masuknya pemukim dalam skala besar yang dengan lantangnya mengumumkan tujuan mereka untuk merebut tanah dari "penduduk asli", kaum Zionis juga akan menghadapi perlawanan otoritas Usmaniyah, yang tidak dapat melihat dengan senang hati pendirian, di bagian penting imperium mereka, komunitas asing yang

menyimpan rancangan politis kenegaraan yang merdeka.

Untuk mengatasi faktor-faktor khas situasinya inilah Gerakan Zionis, sembari mendefinisikan tujuan pamungkasnya dalam Kongres Pertama Zionis, juga merumuskan *program praktis* yang tepat. Program ini menyeru pada tindakan seturut dengan tiga haluan: *organisasi*, *kolonisasi*, dan *negosiasi*.

1. Upaya terorganisir dijadikan sebagai prioritas utama; lantaran, ketiadaan struktur-negara di pusatnya untuk merencanakan dan mengawasi proses kolonisasi di seberang lautan, Gerakan Zionis membutuhkan perangkat yang menyerupai negara (*quasi-state apparatus)* untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Organisasi Zionis Dunia – dengan Federasi-federasi perhimpunan lokalnya, Kongresnya, Dewan Umumnya, Eksekutif Pusatnya – didirikan di Basle untuk memainkan peran tersebut.

2. Instrumen kolonisasi sistemik juga segera dipersiapkan. “Perkreditan Kolonial Yahudi” (1898), “Komisi Kolonisasi” (1898), “Pendanaan Nasional Yahudi” (1901), “Biro Palestina” (1908), “Perusahaan Pengembangan Lahan Palestina” (1908), merupakan institusi-institusi awal yang didirikan oleh Organisasi Zionis. Tujuan bersama mereka adalah untuk merencanakan, mendanai, dan mengawasi proses kolonisasi, dan untuk memastikan kolonisasi ini tidak akan bernasib sama dengan eksperimen kolonisasi serampangan.
3. Ketika instrumen-instrumen kolonisasi dengan segala daya upaya dibangun, upaya-upaya diplomatik juga dikerahkan untuk menghasilkan kondisi politik yang akan membolehkan, memudahkan, dan melindungi kolonisasi skala besar.

Pada mulanya, upaya-upaya ini fokus utamanya pada Kekaisaran Ustmaniyah, kemudian

pada kontrol keberuntungan politik di Palestina. Pendekatan-pendekatan langsung terhadap otoritas Ustmaniyah pun dibuat; janji-janji menggiurkan hibah finansial dan pinjaman diiming-imingi di hadapan Sultan, kekuatan-kekuatan Eropa juga didorong untuk menjadi perantara Porte atas nama Organisasi Zionis. Tujuannya untuk membujuk Sultan agar memberikan Hak Istimewa otonomi pemukiman Zionis di Palestina bagi Organisasi Zionis. Upaya lain juga dikerahkan untuk membujuk Kekaisaran Jerman agar mau menyokong pendirian Perusahaan Pengembang Lahan Sewaan, yang akan dijalankan oleh Zionis di Palestina di bawah perlindungan Jerman. Upaya-upaya lain juga dilakukan untuk mendapatkan izin dari pemerintah Inggris untuk mendirikan pemukiman otonom Zionis di Semenanjung Sinai, sebagai batu loncatan ke Palestina. Namun tak satu pun upaya-upaya itu membuahkan hasil.

Pada akhir dekade pertama setelah perayaan Gerakan Zionis baru pada 1897, Zionisme hanya mencapai sedikit perkembangan untuk membuat perangkat kolonisasi terperincinya bekerja, dan menghasilkan lebih sedikit keberhasilan dalam upaya-upaya politiknya untuk mendapatkan izin dan fasilitasi dari pemerintah untuk kolonisasi di Palestina.

Setelah harapan untuk kolonisasi secara *de jure* pupus. Zionisme kemudian menggeser strateginya sekali lagi, dan beralih ke kolonisasi *de facto* – dengan demikian berharap bisa menambah posisi tawar politis yang akan menghasilkan manfaat ketika nanti tiba waktunya memperbarui upaya untuk mendapatkan pengakuan politik. Dan pada 1907/1908, dimulailah suatu tahap baru kolonisasi Zionis, tanpa terlebih dahulu mencari "legalisasi" atau dukungan dari kekuatan Eropa. Upaya kali ini lebih didorong oleh kesadaran kebangsaan, lebih militan dalam sikap memisahkan diri (*segregationist*) dengan

orang-orang Arab Palestina, dan lebih hirau pada pertimbangan strategis dan politis dalam menentukan lokasi-lokasi pemukiman baru. Namun, dengan segala peningkatan kedinamikaannya dan penajaman kesadaran ideologisnya, gelombang kedua kolonisasi Zionis tetap saja tidak lebih berhasil dari yang pertama, sejauh jika kita menilai besarannya.

Ketika Perang Dunia pertama pecah, kolonisasi Zionis di Palestina mulai menemui keberhasilan kecil setelah 30 tahun bekerja. *Pertama*, Zionis masih minoritas yang sangat kecil yaitu sekitar 1 persen dari keseluruhan Yahudi di dunia. Kegiatan-kegiatan mereka telah memancing ketakutan dan penentangan dari para Yahudi lainnya, yang mencari solusi "Masalah Yahudi" melalui "asimilasi" di Eropa Barat dan Amerika Serikat, bukannya melalui "pemisahan diri" di Palestina. *Kedua*, kolonisasi Zionis berjalan dengan sangat lambat. Setelah 30 tahun imigrasi ke Palestina, jumlah Yahudi ma-

sih di bawah 8 persen dari total populasi seluruh negeri, dan hanya memiliki tidak lebih dari 2½ persen lahan. Dan, *ketiga*, Zionisme telah gagal mendapatkan sokongan politik dari otoritas Ustmaniyah yang menguasai Palestina, atau dari kekuatan Eropa mana pun.

Perang, bagaimanapun, telah menciptakan keadaan baru yang ditakdirkan meningkatkan keberuntungan kolonisasi Zionis di Palestina secara pesat. Hal ini lantaran perang menyediakan panggung bagi persekutuan – ditentukan pada 1917 – antara Imperialisme Inggris dan kolonialisme Zionis, yang dalam 30 tahun ke depan, membuka gerbang Palestina bagi pemukim Zionis, memudahkan pendirian komunitas-pemukim Zionis, dan memuluskan jalan bagi perampasan dan pengusiran orang-orang Arab Palestina dan pendirian negara-pemukim Zionis pada 1948.

Ketika *kolonisasi Zionis sepihak* gagal, dalam 30 tahun sebelum Perang Dunia Pertama,

untuk membuat banyak kemajuan, persekutuan Kolonialisme Zionis dan Imperialis Inggris telah berhasil, dalam 30 tahun setelah Perang Dunia Pertama, dalam mencapai tujuan-tujuan kedua-belah pihak.

II. Persekutuan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis

Hingga Perang Dunia Pertama, kebijakan Inggris di Timur Tengah berkisar pada pemeliharaan keutuhan Kekaisaran Ustmaniyah di Asia. Wilayah Eropa telah dibebaskan dari dominasi Ustmaniyah , wilayah Afrika Utara yang dikuasai Ustmaniyah juga telah dicaplok oleh berbagai kekuatan Eropa, jauh sebelum perang; tapi wilayah Asia pada waktu itu tetap dibuat terjaga dari persaingan imperium antara Kekuatan-kekuatan Eropa. Kepentingan imperium Inggris pada di kawasan itu – yaitu penguasaan Terusan Suez, dan menjaga agar kawasan yang dapat menjadi "rute darat" ke India tetap

bebas dari dominasi pesaing Eropa – lebih terlayani dengan baik oleh Kekaisaran Ustmaniyah yang jinak ketimbang jika Eropa harus "Berebut Timur Tengah", yang mungkin dapat membawa salah satu pesaing Eropa mendekati wilayah Terusan Suez atau merintangi "rute darat".

Namun ketika Turki bergabung dengan Blok Sentral dalam perang, landasan dari kebijakan imperium Inggris untuk timur Tengah remuk-musnah dalam semalam. Kebijakan alternatif untuk masa setelah perang harus dibuat.

Pada mulanya, Inggris membayangkan sebuah tatanan baru di Timur Tengah, di mana otonomi Arab akan menggantikan kekuatan imperium Ustmaniyah di bagian barat daya Asia. Kesepakatan Inggris-Arab untuk itu, diteken pada musim gugur 1915, yang berujung pada Revolusi Arab melawan Turki pada 1916.

Namun tekanan dari Kekuatan Eropa lain – sekutu Inggris semasa perang – menghalangi pe-

nguasaan tunggal Inggris. Kesepakatan tertutup pun kemudian tercapai pada musim semi 1916 antara Inggris, Prancis dan ketsaran Rusia, terkait pembagian rampasan dari Usmaniyah.

Kesepakatan-kesepakatan ini, bagaimanapun, segera saja menimbulkan kejengkelan di kalangan pembuat kebijakan Inggris yang sangat memegang teguh nilai-nilai imperium. Kesepakatan-kesepakatan ini dengan sangat berbahaya dapat membawa Prancis dari sisi timur menjadi terlalu dekat ke Terusan Suez. Dan rasa aman Inggris (yang didasarkan pada keyakinan bahwa Semenanjung Sinai tidak dapat ditembus) telah koyak oleh pengalaman perang yang baru saja terjadi, saat itu jadi terasa bukan hanya Sinai, tetapi juga Palestina, harus diamankan agar keamanan Terusan Suez terjamin. Kesepakatan Inggris-Prancis pada 1916, menetapkan internasionalisasi terhadap sebagian besar Palestina, karena itu dipandang dengan kewaspadaan oleh para ahli kenegaraan Inggris

yang berkecenderungan pada nilai-nilai imperium; bertaruh dengan klaim Prancis terhadap seluruh wilayah Prancis tentu tidak meredakan kegelisahan yang telah muncul dari kalangan imperialis Inggris.

Pada awal 1917, kabinet baru Inggris secara aktif mencari cara dan sarana untuk membebaskan diri dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai oleh pendahulunya dengan Prancis seputar pembagian rampasan perang di wilayah Arab Kekaisaran Usmaniyah. Pada titik itulah upaya Zionis yang sebelumnya ditinggalkan untuk mendapatkan sokongan Inggris dalam menciptakan Palestina yang didominasi Zionis kembali diaktifkan, dengan dorongan dari Inggris.

Kepentingan yang saling timbal-balik ini kemudian menyatukan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis. Di satu sisi, Inggris, dengan memanfaatkan pengaruh Zionis di Amerika Serikat dan Prancis, yang akan mencegah penguasaan internasional di Palestina, dengan

dalih program kolonisasi Zionis yang disokong Inggris mensyaratkan kekuasaan Inggris di Palestina. Di sisi lain, dengan memainkan peran katalis yang akan mewujudkan penunjukan Inggris sebagai kekuatan yang berkuasa di Palestina, Zionisme akhirnya dapat memulai program kolonisasi skala besar yang sudah mereka tunggu-tunggu ke wilayah yang mereka inginkan di bawah perlindungan kekuatan besar. Inggris meyakini bahwa komunitas-pemukim Zionis yang diperangi akan terus bergantung pada perlindungan Inggris hingga waktu yang tak terpermanai, dan akan secara terus-menerus membutuhkan (dan membenarkan) kehadiran Inggris di Palestina; sedangkan, pada bagiannya, Zionisme meyakini bahwa Inggris, terikat secara internasional pada komitmen masa perangnya untuk memfasilitasi kolonisasi Zionis, akan menyediakan komunitas-pemukim perlindungan yang dibutuhkan, pada tahap pembentukan dari pendiriannya, untuk melawan penentang-

an Arab yang sudah diperkirakan. Persekutuan yang saling memudahkan dan saling membutuhkan, menyatukan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis, pun paripurna.

Upaya pendahuluan Zionis di Washington untuk mendapatkan persetujuan Amerika Serikat tidaklah gagal – terlepas dari penekanan Presiden Woodrow Wilson pada prinsip penentuan nasib sendiri, yang dengannya Kolonisasi Zionis di Palestina terjadi, meskipun akan berbenturan dengan oposisi dari Arab. Begitu juga dengan upaya serempak Zionis di Paris, untuk mendapatkan persetujuan revisi kesepakatan Inggris-Prancis yang telah diteken sebelumnya terkait masa depan Palestina, tidak sepenuhnya mengecewakan. Dengan sudah dilakukannya kerja-kerja persiapan, Inggris kemudian mengumumkan pernyataan-kebijakannya pada November 1917, seringkali disebut sebagai Deklarasi Balfour, yang menyatakan dukungan terhadap pendirian “Tanah Air” Yahudi

di Palestina. Menurut rencana, Zionis kemudian mengajukan Konferensi Damai untuk memberikan Mandat Palestina kepada Inggris. Inggris, pada gilirannya, mengesahkan upayanya, pertama dengan mengumumkan Deklarasi Balfour, dalam teks Mandat Palestina. Jalannya sekarang telah lempang-terbuka, bagi Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis, untuk secara bersama-sama mencapai tujuannya masing-masing.

Inggris tak membuang banyak waktu untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi kolonisasi Zionis. Mereka menunjuk Yahudi Zionis sebagai Komisioner Tinggi pertamanya di Palestina. Mereka mengakui Organisasi Zionis Dunia sebagai perwakilan "Agensi Yahudi". Mereka membuka gerbang Palestina untuk imigrasi Zionis besar-besaran, kendatipun mendapat protes-protes dari Arab. Mereka mengalihkan lahan negara kepada Zionis untuk kolonisasi. Mereka memberi perlindungan bagi institusi-institusi dari Tanah Air yang sedang tumbuh itu. Mereka meng-

izinkan komunitas Zionis untuk menjalankan sekolah-sekolah dan memelihara lembaga militer (*Haganah*). Mereka melatih pasukan serang gesit (*Palmach*), dan membiarkan keberadaan organisasi teroris bawah tanah (Stern dan Irgun). Tidak mengherankan jika pada pertengahan 30-an, Komisi Kerajaan Inggris menggambarkan komunitas-pemukim Zionis sebagai "negara dalam negara". Di saat yang sama, mayoritas Arab – sembari secara terus-menerus diyakinkan bahwa Inggris akan tetap memperhatikan mereka dan hak-haknya tidak akan "dirugikan" oleh pertumbuhan pesat komunitas-pemukim Zionis – tidak diberikan kemudahan-kemudahan yang sama sebagaimana yang diberikan pada komunitas-pemukim Zionis. Mereka juga dilarang untuk memiliki sarana mempertahankan diri.

Setelah 30 tahun kekuasaan Inggris, komunitas-pemukim Yahudi bertumbuh sebesar 12 kali lipat jumlah mereka pada 1917, dan merepresentasikan tidak kurang dari sepertiga total

penduduk Palestina. Di saat yang sama, mereka juga telah mengembangkan, di bawah bantuan Penguasa Dominan (*mandatory power*), institusi-institusi yang menyerupai pemerintahan dan lembaga militer yang cukup besar.

Namun Inggris tidak berkongsi dengan Zionisme di Palestina hanya untuk melayani rencana-rencana Kolonialisme Zionis; mereka berharap kongsi tersebut bermanfaat bagi, secara sebanding, tujuan-tujuan Imperialisme Inggris juga. Setiap kali Zionisme mencari cara untuk mempercepat proses pendirian negara (yang akan membuat keberlanjutan keberadaan Inggris di Palestina menjadi tak perlu atau tak diinginkan di mata Zionis), Inggris akan bergerak ke arah berlawanan untuk memperlambat rencana-rencana Zionis itu. Perang Dunia Kedua mempercepat proses pertikaian ini, yang pada akhirnya membawa pada bubarnya Persekutuan Inggris-Zionis.

Pada akhir Perang Dunia Kedua, melemahnya Inggris semasa perang, dan kemerdekaan India yang semakin dekat, telah menyebabkan menurunnya minat Inggris secara relatif terhadap Persekutuan. Di saat bersamaan, perlawanan yang semakin menguat dari negara-negara Arab yang baru muncul terhadap peran Inggris di Palestina memaksa Inggris untuk mulai membatasi agenda-agenda Zionis yang sebelumnya mereka sokong penuh. Di sisi lain, munculnya Amerika Serikat sebagai Kekuatan Dunia, dengan kepentingan ekonomi dan strategis di Timur Tengah, dan daya tanggap politisi Amerika yang semakin besar terhadap pergerakan Zionis, menawarkan Zionisme bakal calon penyokong barat alternatif untuk tahap pencaplokan Palestina yang amat penting.

Di pertengahan 40-an, dengan itu, kolonisasi Zionis yang telah dilindungi dan dirawat oleh Imperialisme Inggris selama 30 tahun, akhirnya siap untuk menemukan penyokong yang lebih

kuat dan militan untuk mengantar pada perjuangan yang akan datang demi status kenegaraan yang utuh; dan Amerika Serikat saat itu muncul sebagai kandidat yang bersedia dan sangat memenuhi syarat bagi Zionisme.

Jika Liga Bangsa-bangsa menjadi instrumen bagi persekutuan Inggris dan Zionis untuk mendapatkan suatu pengakuan internasional, Persekutuan Bangsa-bangsa kemudian digunakan untuk tujuan yang sama oleh persekutuan Amerika dan Zionis. Inggris telah berhasil mendorong kolonisasi Zionis Eropa melalui Liga Bangsa-bangsa yang didominasi Eropa: Amerika Serikat kemudian memimpin mayoritas Eropa-Amerika untuk mengesampingkan penentangan minoritas Afrika-Asia di Majelis Umum, dan menyokong pendirian Negara kolonial Zionis di atas daratan yang menjembatani Afrika dan Asia, di atas tanah Arab Palestina. Selain Uni Afrika Selatan yang saat itu juga dikuasai oleh pemukim minoritas, tak ada negara Asia atau Afrika

lain yang menyatakan dukungannya terhadap "rencana pembagian" yang diajukan ke Majelis Umum melalui Komisi Khusus untuk Palestina; dan, sekalipun akhirnya pada pengambilan suara 29 November 1947, satu negara Asia dan satu negara Afrika (selain Uni Afrika Selatan) mendukung pengadopsian rencana tersebut, dukungan antusias terhadap rencana itu tetap hanya datang secara eksklusif dari negara-negara Eropa, Australasia, dan belahan dunia barat. Negara asing kemudian dipancangkan di daratan yang menghubungkan Asia dan Afrika tanpa persetujuan bebas dari satu pun negara tetangga Afrika dan Asia.

Itulah babak yang tragis bagi Palestina dan kaum Arab Palestina – dilemahkan oleh 30 tahun penindasan Inggris – terbukti tak mampu bertahan dari makar komunitas Zionis, yang terorganisir, terlatih, dan dipersenjatai, dan disokong oleh komunitas Eropa-Amerika internasional saat itu.

Orang-orang Arab Palestina tidak hanya kalah dalam pertarungan untuk merebut *kontrol politik* atas negerinya sendiri – mereka malah kehilangan negerinya itu. Orang-orang Palestina diusir secara paksa dari kampung halamannya; dan kampung halamannya pun, yang telah dikosongkan dengan zalimnya dari penduduk yang berhak, kemudian dibuka untuk gelombang kolonisasi yang terorganisasi dengan baik dan didanai secara melimpah, dilaksanakan dengan segera untuk membuatnya sebagai ketentuan yang harus dihadapi (*fait accompli*), pembalikan yang opini publik dunia enggan mendesaknya.

Persekutuan Kolonialisme Zionis dengan satu Kekuatan Imperialisme Barat pada akhirnya selesai, setelah persekutuan tersebut memenuhi tujuannya; namun persekutuan itu kemudian menjelma kembali dalam bentuk yang baru, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dunia dan tahapan Kolonialisme Zionis yang baru. Saat satu penyokong baratnya mundur ke

balik pelataran, penyokong barat lainnya akan dengan cepat menggantikan posisinya. Kolonialisme Zionis mengubah taktiknya dalam persekutuan – namun tidak meninggalkan strategi persekutuan imperialisnya. Hal ini lantaran, jika bergantung pada tali pusar yang menghubungkan komunitas-pemukim Zionis dengan sumber dan pasokan kekuatan ekstra-regionalnya sendiri, maka mereka akan hanya punya sedikit kemampuan untuk bertahan hidup.

Bahkan persekutuan dengan Imperialisme Inggris pun hanya dibubarkan sejenak. Ketika tiba waktunya bagi strategi imperial Inggris yang telah diperbarui, dalam keadaan dunia yang berubah, untuk mencari pemenuhan dirinya melalui penyelarasan baru dengan Kolonialisme Zionis – yang kala itu bertujuan, dengan status barunya sebagai negara, pada sasaran baru untuk melebarkan wilayahnya – kolusi antara sekutu lama pun, bersama dengan Republik

Keempat Prancis, kemudian siap disusun. Invasi terhadap Mesir pada 1956 pun terjadilah.

Dan, ketika Republik Keempat Prancis ambruk dan pengalaman apes Inggris di Suez membuat kebergantungan negara-pemukim Zionis terhadap dua negara tersebut untuk sikap agresif yang lebih jauh menjadi tidak layak, Zionisme tak banyak menemukan hambatan untuk mendapatkan Kekuatan Eropa lain sebagai pemasok senjata-senjata agresifnya. Dengan permintaan dari Amerika Serikat, Republik Federal Jerman pun dengan cepat mengisi kekosongan – dengan memberi bantuan ekonomi besar-besaran (di mana rasa bersalah Jerman, dengan cerdiknya dimanipulasi oleh Zionisme Dunia, telah berhasil membuat Republik Federal mengulurkan tangannya bagi negara pemukim Zionis dalam nama "ganti rugi") dengan pemberian bantuan militer yang berlimpah, disepakati dan diberikan secara diam-diam.

Namun, dari semua cara-cara bertahan hidup yang telah berhasil didapatkan, dari satu kekuatan barat ke kekuatan barat lainnya, negara-pemukim Zionis tetaplah lembaga yang asing bagi sekitarnya. Bukan hanya lantaran hubungannya yang vital dan berlanjut dengan Imperialisme Eropa, dan masuknya mereka ke Palestina melalui praktik-praktik Kolonialisme Barat, tetapi juga pola eksklusivitas ras dan pemisahan diri yang mereka pilih itulah yang membuat mereka menjadi masyarakat terasing di Timur Tengah. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan dengan lebih baik karakter mendasar mereka yang terasing selain baris-baris kata berikut, sebagaimana ditulis oleh Perdana Menteri veterannya:

> "Negara Israel merupakan bagian dari Timur Tengah hanya dalam geografinya saja, yang mana, utamanya, adalah unsur yang statis. Dalam aspek-aspek penentu dinamismenya, penciptaan dan

pertumbuhannya, Israel adalah bagian dari Yahudi dunia. Dari keyahudiannya itu Israel akan mendapatkan kekuatan dan sarana-sarana yang membentuk bangsa Israel dan membangun Negeri; melalui kebesaran Yahudi dunia Israel akan dibangun dan dibangun kembali.[3]

3 Ben-Gurion, David, *Rebirth and Destiny of Israel,* New Philosophical Library, 1954, p. 489.

III. Karakter Negara-Pemukim Zionis

Terlepas dari keterhubungannya yang vital dengan Imperialisme dan status keterasingan totalnya yang tak terhindarkan di Timur Tengah, dalam sanubarinya mereka telah memilih untuk menanamkannya sendiri, pengejawantahan politik Kolonialisme Zionis (yang disebut sebagai, negara-pemukim Zionis Israel). Terdapat tiga sifat utama yang mencirikan negara-memukim Zionis Israel ini: (1) corak rasial dan pola pengaturan rasis; (2) ketergantungannya dengan kekerasan; dan (3) sikap ekspansionis.

A. Rasisme

Rasisme bukanlah sifat yang oleh negara-pemukim Zionis ditemukan dalam proses. Bukan pula sifat yang kebetulan, hanya sepintas lalu dalam rentang hidup Israel. Ini adalah sifat bawaan, mendasar, dan permanen. Karena sifat ini melekat dalam ideologi Zionisme dan dalam motivasi dasar kolonisasi dan pembangunan negara Zionis.

Zionisme percaya pada kemanunggalan bangsa seluruh Yahudi – yang diidentifikasi melalui anggapan kesamaan nenek moyang. Dalam keyakinan Zionis, "ikatan kebangsaan" Yahudi itu tidak didirikan atas dasar *keagamaan* atau *bahasa*. Sebab mereka tahu bahwa hanya relatif sedikit dari Zionis yang percaya atau mengamalkan Yahudi sebagai agama; dan bahasa Ibrani pun baru dihidupkan kembali sebagai bahasa setelah lahirnya Zionisme. Undang-undang terbaru dan keputusan pengadilan pembuatan preseden di negara Zionis, serta li-

teratur politik Gerakan Zionis sejak kemunculannya, menunjukkan bahwa *garis keturunanlah* – fakta biologis belaka yang menyatakan seseorang adalah keturunan dari Yahudi lain – yang dapat membuat seseorang sebagai "Yahudi" di mata Zionis.

Identifikasi rasial Zionis menghasilkan tiga dampak wajar: *pemisahan diri rasial, eksklusivitas rasial,* dan *keunggulan rasial*. Tiga prinsip ini yang membangun inti dari ideologi Zionis.

Dorongan primordial bagi Kolonialisme Zionis adalah pengupayaan "realisasi-diri nasional" dengan "bangsa Yahudi", melalui perkumpulan kembali dalam satu wilayah dan kenegaraan yang berdaulat. *Pemisahan diri rasial dengan demikian adalah inti dari Zionisme*.

Secara alamiah, pemisahan diri rasial menghalangi integrasi atau asimilasi. Sejak Theodor Herzl hingga Chaim Azriel Weizmann, sejak David Ben Gurion hingga Nahum Gold-

mann, para pemimpin Zionisme meyakini dan mengkhotbahkan bahwa musuh utama Zionisme bukanlah "anti-Semitisme" dari non-Yahudi melainkan "asimilasi" Yahudi. Karena itu, "anti-Semitisme" dan Zionisme bersepakat pada premis dasar: bahwa semua Yahudi adalah sebangsa, dengan karakteristik kebangsaan dan nasib kebangsaan yang sama. Perbedaan di antara mereka adalah, ketika "anti-Semitisme" menghinakan apa yang disebut sebagai "karakteristik bangsa" Yahudi dan bersukaria atas kenelangsaan Yahudi, Zionisme mengidealisasikan karakteristik khayalan itu dan mengupayakan agar seluruh Yahudi berkumpul dalam satu negara Yahudi, yang mana bahkan Zionis moderat sekalipun akan menganggapnya sebagai "misi istimewa".

Menurut kepercayaan Zionis, "asimilasi" berarti hilangnya "jati diri Yahudi"; ia adalah awal mula dari "terlebur" dan "terhapuskannya" "bangsa Yahudi". "Pemisahan diri" adalah tang-

gapan Zionis terhadap "asimilasi Yahudi; karena "pemisahan diri" sebagaimana dibayangkan adalah satu-satunya jalan menuju "penyelamatan", "pengampunan", dan "pemenuhan janji".

Dengan logika yang sama, berdasarkan pandangan yang dengan tanpa kompromi menolak asimilasi Yahudi ke dalam masyarakat non-Yahudi, prinsip dasar pemisahan diri rasial menuntut pula *pemurnian* dan *eksklusivitas rasial* di negeri di mana pemisahan diri Yahudi hendak dicapai. Dengan begitu, kepercayaan Zionis dalam hal pemisahan diri rasial tentunya menolak hidup berdampingan antara Yahudi dan non-Yahudi dalam suatu negeri di mana Yahudi hendak dikumpulkan. Hidup berdampingan dengan komunitas bukan Yahudi – termasuk penduduk asilnya – di suatu wilayah di mana Yahudi akan dikumpulkan adalah pencemaran terhadap imaji kemurnian rasisme Zionis sebagaimana pula keberlanjutan Yahudi untuk tinggal di negeri-negeri non-Yahudi, misalnya, di

negeri-negeri yang disebut "pengasingan Yahudi".

Cita-cita pemisahan diri rasial Zionis menuntut, dengan kemendesakan yang sama, perginya semua Yahudi dari negeri-negeri "pengasingannya" dan penggusuran semua yang bukan Yahudi dari negeri "tempat tujuan Yahudi", yaitu Palestina. Keduanya adalah syarat-syarat mendasar "pemenuhan janji Zionis" dan "penyelamatan kebangsaan" Yahudi.

Hanya dalam kondisi pemisahan diri yang saksama inilah "keunggulan Yahudi" dapat, pada akhirnya, mewujudkan dirinya sendiri, menurut ajaran Zionisme: "Orang-orang Terpilih" dapat mencapai "takdir istimewa" hanya ketika mereka *terkumpul semua dengan sesamanya*.

Di sinilah letak perbedaan penting dari rasisme Zionis dan bentuk lain rasisme Eropa yang mirip, sejak munculnya Kolonialisme, terha-

dap orang Asia dan Afrika. *Supremasi ras penjajah Eropa di berbagai tempat di Asia dan Afrika*, pada umumnya, memungkinkan dirinya untuk mengekspresikan "keunggulannya" terhadap percabangan "kaum rendahan" dan "ras inferior" dalam kerangka "hidup berdampingan dalam hierarki rasial". Terpisah dan timpang, kaum penjajah Eropa dan "pribumi" dapat secara keseluruhan hidup bersama dalam satu koloni atau protektorat yang sama. Meskipun mereka menghinakan "kaum pribumi", menindasnya dengan kejam, dan secara sistematis mendiskriminasi "kaum pribumi", penjajah Eropa dalam kekuasaannya menganggap berlanjutnya keberadaan pada penduduk asli "berguna" bagi mereka; dan, dengan begitu, mereka mengkhususkan pekerjaan-pekerjaan kasar dan peran-peran rendahan bagi "kaum pribumi" di dalam masyarakat yang telah dikuasai pemukim. Tidak begitu bagi Zionis! Pemukim Zionis yang percaya pada keunggulan ras di Palestina telah mera-

sa perlu untuk mengambil jalan yang berbeda, yang lebih selaras dengan sistem ideologi mereka. Mereka telah mengekspresikan "keunggulan" khayalan mereka terhadap "pribumi" Arab, pertama-tama dengan mengisolasi diri mereka sendiri dari orang-orang Arab di Palestina, dan kemudian, dengan mengusir kaum Arab dari kampung halamannya.

Tidak terjadi di mana pun di Asia atau Afrika – tidak pula di Afrika Selatan atau Rhodesia – keunggulan ras Eropa diekspresikan dengan semangat yang begitu bergairahnya untuk eksklusivitas rasial yang tuntas-saksama dan pengusiran penduduk pribumi di sepanjang garis batas negara-pemukim, sebagaimana yang terjadi di Palestina, di bawah dorongan doktrin Zionis. (Barangkali perbedaan Zionisme dari norma kolonisasi Eropa ini dapat dijelaskan melalui fakta bahwa dedikasi sadar terhadap doktrin rasis yang melekat dalam ideologi Zionisme ini telah mendahului, merangsang, mengilhami, dan

pada setiap tahapnya memandu proses kolonisasi Zionis di Palestina – setidaknya sejak dilantiknya Gerakan Zionis baru pada 1897.)

Selama mereka belum cukup kuat untuk mengusir orang-orang Arab asli Palestina (mayoritas luas populasi negeri tersebut), para pemukim Zionis cukup puas dengan *mengisolasi diri mereka* dari komunitas Arab dan melembagakan pemboikotan terhadap produksi dan tenaga kerja Arab secara sistematis. Karena itulah, sejak hari-hari paling awal kolonisasi Zionis, suatu asas dibuat agar hanya tenaga-tenaga kerja Yahudi yang dipekerjakan di koloni-koloni Zionis. "Agensi Yahudi", "Pendanaan Nasional Yahudi", "Yayasan Pendanaan Palestina", dan "Federasi Tenaga Kerja Yahudi" dengan awasnya memastikan kepatuhan terhadap prinsip fundamental kolonisasi Zionis itu.

Kepuasan *memboikot* Arab Palestina ketimbang mengusir mereka dari negerinya ini, bagaimanapun, hanyalah taktik dan penangguhan

sementara dari eksklusivitas rasial dogma Zionis. Hal ini terpaksa dipraktikkan dalam Zionisme karena keadaan sekitar pada tahap-tahap awal kolonisasi Zionis. Dan hal ini dipandang sebagai hal buruk yang perlu, hanya untuk dipertahankan lantaran penerapan yang lebih keras dari doktrin rasis Zionisme masih tertahan oleh faktor-faktor luar yang tidak dapat dikendalikan Gerakan Zionis. Tujuan akhir untuk mengusir penduduk Arab Palestina untuk memungkinkan perwujudan prinsip eksklusivitas rasial bagaimanapun juga tak pernah ditinggalkan. Sejak 1895, Herzl telah sibuk menyusun rencana untuk "mendorong populasi miskin sepanjang perbatasan dengan tidak memberikan pada mereka pekerjaan"[4]; dan, pada 1919, Weizmann

---

4 Herzl, Theodor, *Complete Diaries,* Vol. I, 1960, p. 88. (Entry of 12 June 1895; quoted in Childers, Erskine B., "Palestine: The Broken Triangle", in *Journal of International Affairs,* Vol. XIX, No. 1, 1965, p. 93).

telah meramalkan penciptaan Palestina untuk "Yahudi sebagaimana Inggris untuk orang Inggris"[5], dan mendefinisikan program Zionis sebagai membangun "suatu kebangsaan yaitu Yahudi sebagaimana bangsa Prancis untuk orang Prancis dan bangsa Inggris untuk orang Inggris"[6]. Maka, sekalipun hingga 1948 tujuan Zionis belum terpenuhi, melalui pengusiran paksa mayoritas Arab Palestina dari negerinya, tujuan de-Arabisasi Palestina (sebagai syarat men-zionis-kan negeri) telah dilakukan oleh Gerakan Zionis sejak awal kemunculannya.

Konsep Zionis tentang "solusi akhir" terhadap "persoalan Arab" di Palestina, dan konsep Nazi tentang "solusi akhir" terhadap "persoalan

---

5 Weizmann, Chaim, *Trial and Error,* New York, Harper and Brothers, 1949, p. 244.

6 Quoted in *The Political History of Palestine Under British Administration,* Jerusalem, Government Printer, 1947, p. 3 (paragraph 12).

Yahudi" di Jerman, pada dasarnya mengandung bahan baku yang sama: penghilangan unsur manusia dalam persoalan tersebut. Penciptaan "Jerman yang bebas dari Yahudi" memang diupayakan oleh Nazisme melalui metode yang lebih kejam dan tidak manusiawi ketimbang penciptaan "Palestina yang bebas dari Arab" yang dicapai Yahudi: namun di balik perbedaan teknis itu terdapat kesamaan tujuan.

Jika *diskriminasi rasial* terhadap "pribumi yang lemah" adalah semboyan dari rezim penjajah supremasi ras Eropa di Asia dan Afrika, semboyan rezim penjajah supremasi ras Zionis adalah *penghabisan rasial*. *Perlakuan diskriminatif* dipersiapkan oleh Zionis bagi sisa-sisa Arab Palestina yang secara keras kepala bertahan di kampung halaman mereka sekalipun segala upaya untuk merampok dan mengusir mereka telah dilakukan, dan menentang dikte Zionis tentang eksklusivitas rasial. Terhadap sisa-sisa dari penduduk yang berhak atas tanah-

nya di Palestina inilah pemukim Zionis menunjukkan pola perilaku diskriminasi rasial, perilaku yang telah tersohor di kalangan pemukim rasis Eropa di tempat-tempat lain di Asia dan Afrika.

Pada kenyataannya, dalam praktik diskriminasi rasial terhadap sisa-sisa Arab Palestina, negara-pemukim Zionis telah banyak mengambil pelajaran dari berbagai rezim diskriminatif negara pemukim kulit putih di Asia dan Afrika yang dapat mengajarinya. Dan telah terbukti, dalam upaya ini, murid yang pandai dan bersemangat ini gagal melampaui guru-gurunya. Lihatlah bagaimana mahaguru *apartheid* Afrikaner di Afrika Selatan dengan berani mengumumkan dosanya, praktisi *apartheid* Zionis di Palestina justru dengan penuh tipu daya menyatakan ketidakberdosaan mereka.

Sisa-sisa Arab Palestina yang tetap tinggal di negara -pemukim Zionis sejak 1948 mendapatkan "Bantustan/teritori khusus" mereka, "cagar

pribumi" mereka, "Ghetto-ghetto" – meskipun institusi yang mereka alami dalam keseharian mereka ini diberi nama yang dilembut-lembutkan oleh otoritas Zionis, "zona keamanan".

Sekitar 90 persen orang-orang Arab yang tinggal di wilayah yurisdiksi Israel tinggal di bagian "zona-zona keamanan" negeri itu.

Terisolasi di negara pemukim Zionis, orang-orang Arab ini hidup di bawah *hukum darurat militer*. Sementara di bagian lain negara itu yang berlaku adalah hukum administrasi sipil, di "zona kenyamanan" yang dihuni Arab, fungsionaris administrasinya adalah perwira militer, yang bertugas di bawah Kementerian Pertahanan. Orang-orang Arab yang didakwa melakukan pelanggaran berdasarkan darurat militer yang berlaku di "zona kenyamanan" ("Peraturan [Pertahanan] Darurat") dituntut di hadapan pengadilan militer, yang keputusannya tidak dapat diajukan banding. Deportasi dan pengasingan

paksa, atas perintah Gubernur Militer, adalah hal yang biasa terjadi.

Terkucil di negara-pemukim Zionis, penduduk Arab di "zona keamanan" menjadi subjek dari *sistem kartu tanda masuk*, yang dengan lalimnya membatasi ruang gerak dan jalan mereka.

Terisolasi di negara-pemukim Zionis, kaum Arab diingkari hak-hak dasarnya untuk berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Mereka tidak diperbolehkan menerbitkan koran atau membentuk organisasi politik.

Peluang pendidikan bagi orang-orang Arab sangat dibatasi; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin diskriminatif pula pembatasan peluangnya. Kualitas sistem pendidikan yang dapat diakses secara sangat terbatas oleh kaum Arab sangat minim dan tidak bisa dibandingkan dengan sistem pendidikan yang terbuka bagi warga Yahudi.

Secara ekonomi, kaum Arab dalam negara-pemukim Zionis dibuat sengsara oleh tiga lapis rintangan: akses terbatas untuk mendapatkan peluang kerja menciptakan penganggur-an skala besar; pun jika mereka diperbolehkan mendapatkan pekerjaan maka jenis pekerjaan itu terbatas pada pekerjaan-pekerjaan kasar; dan mereka juga diingkari haknya dalam mendapatkan "upah setara untuk kerja yang setara".

Lahan pertanian dan rumah-rumah kaum Arab di negara-pemukim Zionis juga dapat sewaktu-waktu disita melalui dekrit pemerintah, di bawah serangkaian perubahan undang-undang yang drastis, yang diperkenalkan negara pada 1948 dan 1953, yang menyangkal kemampuan pemilik lahan untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan. Seluruh desa-desa Arab dirampas dan dicaplok dan kemudian diberikan pada warga Yahudi untuk pembangunan pemukiman Zionis.

Partisipasi Arab dalam administrasi negara-pemukim Zionis, di *setiap tingkatan tanggung jawab yang berarti*, hampir tidak bisa diketahui; di departemen-departemen pemerintahan, partisipasi Arab di setiap level absen sama sekali. Bahkan di kantor pemerintahan yang bertugas dalam urusan-urusan kaum Arab, tidak ada seorang Arab pun yang dipekerjakan!

Pada akhirnya, kaum Arab yang ingin menikmati hak dasar warga negara di negeri mereka sendiri dibatasi oleh *undang-undang diskriminatif*. Sementara seorang Yahudi, dengan Undang-undang Kewarganegaraan, dianggap langsung memenuhi syarat segera setelah ia tiba, penduduk asli Arab di negara-pemukim Zionis harus mengikuti sistem kelayakan untuk memenuhi syarat yang membuat mayoritas Arab Israel merana di tepian ketiadaan status warga negara.

B. Kekerasan dan Terorisme

Kebiasaan untuk menggunakan kekerasan, oleh kelompok militer bersenjata dari negara pemukim Zionis, telah diarahkan terutamanya terhadap kaum Arab – yang keberadaannya di negeri tujuan Zionis menjadikan mereka secara otomatis menjadi sasaran permusuhan Zionis. Namun ketergantungan pada kekerasan tidak secara total terbatas, dalam manifestasinya, pada hubungan Zionis dan Arab saja. Menjelang akhir Mandat Inggris – ketika persekutuan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis, setelah mencapai tujuannya, mulai mengalami ketegangan hingga akhirnya bubar jalan – para-militer dan organisasi teroris Zionis (yang telah mendapat bantuan dan pemakluman dari Inggris selama puluhan tahun) berbalik melawan pasukan dan otoritas sipil Inggris di Palestina. Dan, setelah merebaknya permusuhan antara Zionis-Arab di Palestina, dan kemunculan PBB sebagai mediator dan pengawas gencatan

senjata, kekerasan Zionis juga dialamatkan pada personil internasional. Pembunuhan terhadap Mediator PBB yang pertama dan ajudan militernya, mengakhiri hambatan sewaktu-waktu dari Mediator PBB, telah menjadi maklumat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merintangi jalan Zionis akan aman dari pembalasan Zionis.

Namun secara jelas-jelas, terhadap kaum Arab itulah kekerasan Zionis telah berlangsung paling lama, paling sistematis, dan paling kejam.

Sejak sebelum lahir dan pada kelahirannya, negara-pemukim Zionis menggunakan kekerasan sebagai sarana yang mereka pilih untuk mengintimidasi dan mengusir kaum Arab Palestina. Pembantaian-pembantaian yang terjadi di Dair Yaseen, Ain ez-Zaitoun, dan Salah ed-Deen (pada April 1948) adalah tindakan yang terukur dalam program formal penggusuran melalui teror.

Sejak pendiriannya, negara pemukim Zionis mengarahkan kekerasan baik ke dalam maupun ke luar: terhadap Arab yang masih tersisa di wilayah yurisdiksinya, dan terhadap negara-negara Arab yang bersebelahan.

Di wilayah Palestina yang dikuasai Zionis, *pembantaian dan kekejaman lainnya* terjadi di kota-kota dan desa-desa Arab seperti Iqrith (Desember, 1951), Al-Tirah (Juli, 1953) Abu Gosh (September, 1953), Kafr Qasim (Oktober, 1956), dan Acre (Juni, 1965) merupakan yang paling keji – namun bukan berarti hanya di tempat-tempat itu saja – contoh kasus dari program kebencian rasial yang diangkat hingga ke level kebijakan negara yang dilaksanakan secara efisien oleh perangkat resmi negara.

Contoh-contoh kasus ini harus ditambahkan dalam daftar *pogrom* skala besar yang dilancarkan terhadap populasi Arab di Gaza dan Khan Younis, selama pendudukan Zionis yang singkat

namun sarat peristiwa, di awal Invasi Tripartit ke Mesir pada 1956.

Serangan militer sistematis ke wilayah-wilayah negara Arab yang berdekatan mungkin adalah manifestasi dari kesiapan Israel untuk menggunakan kekerasan - serangan-serangan ini banyak dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Sebagai tambahan pada *perang skala-penuh*, dilancarkan secara bersama-sama oleh Penjajah Zionis, Imperialisme Inggris, dan Imperialisme Prancis terhadap Mesir pada 1956, dan disesali oleh Dewan Umum PBB dalam enam resolusi yang kemudian diadopsi antara 2 November 1956 hingga 2 Februari 1957, serangan skala-kecil di Hamma (April, 1951), Qibiya (Oktober, 1953), Gaza (Februari, 1955), dan sepanjang Danau Tiberias (Desember, 1955 dan Maret, 1962) yang dengan patutnya dikecam oleh Dewan Keamanan, masing-masing pada 18 Mei 1951, 24November 1953, 29 Maret 1955, 19 Juni 1956, dan 9 April 1962. Serangan-serangan

lain, terlalu banyak untuk dicatat satu per satu, juga mendapat kecaman dari Komisi Gencatan Senjata Gabungan.

C. Ekspansi Wilayah

Setiap orang yang mempelajari pola perilaku Gerakan Zionis dan *modus operandi* negara-pemukim Zionis pasti menyadari bahwa pencapaian-pencapaian Zionis pada suatu waktu, jika pencapaian itu masih belum sesuai dengan tujuan yang secara terus-menerus disasar Gerakan Zionis, adalah sekadar pemberhentian sementara di sepanjang jalan pemenuhan-diri tertinggi dan bukan titik pemberhentian dalam perjalanan Zionis – terlepas dari jaminan berkebalikan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh para pemimpin Zionis dan Israel.

Sebagai contoh, sekalipun pada 1897 hingga 1942 para pemimpin resmi Zionisme secara terus-menerus menyangkal di hadapan publik

bahwa mereka mengupayakan suatu “negara”, menekankan bahwa mereka hanya mengupayakan sebuah “rumah”, dokumen-dokumen internal dan catatan harian para pemimpinnya dengan jelas menunjukkan, terlepas dari penyangkalan di hadapan publik, bahwa mewujudkan negara itulah yang selama ini menjadi tujuan Zionisme. (Tujuan mendirikan negara Zionis, pertama kali diakui secara terbuka pada 1942, kemudian diraih enam tahun setelahnya).

Demikian pula, hingga tahun 1948, para pemimpin Zionisme secara terus-menerus meyakinkan dunia bahwa mereka tidak pernah berniat untuk merampas atau mengusir Arab Palestina dari kampungnya – sekalipun terdapat bukti yang berlimpah bahwa, pada kenyataannya, mereka memang bertujuan untuk Zionisasi dan de-Arabisasi Palestina secara menyeluruh sejak sangat awal; dan, ketika peluangnya muncul pada 1948, Zionis tidak membuang-buang

waktu untuk mendorong orang-orang Arab keluar perbatasan.

Dalam dua hal penting ini, tujuan sebenarnya Zionisme telah diketahui oleh mereka yang mempelajari dan mengamati dari dekat Gerakan Zionisme; tipu muslihat dan penyangkalan publik oleh Zionis hanya tabir asap yang didesain menutupi tujuan sebenarnya yang tak pernah berganti, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan waktu demi menyiapkan langkah yang tepat di waktu yang tepat.

Perluasan wilayah adalah elemen ketiga dari rencana Zionis, yang mengenainya telah diterapkan tipu muslihat penyangkalan publik. Elemen ini berbeda dari dua elemen lain (yaitu kenegaraan dan pengusiran kaum Arab) hanya sebatas, jika dua tujuan tadi sudah diwujudkan dan kedoknya pun sudah sepenuhnya dibuka, maka tujuan yang ketiga (yaitu perluasan wilayah) baru terwujud sebagiannya, dan tirainya baru sebagiannya saja yang terangkat.

Cita-cita kekal Zionisme adalah dan masihlah mendirikan negara di seluruh Palestina (yang disebut oleh Zionis sebagai "Eretz Israel", atau Negeri Israel), *sepenuhnya bersih dari kaum Arab*.

Gambaran minimal dari lingkup wilayah Palestina, sebagaimana dicita-citakan Zionis, secara resmi dirumuskan pada 1919; dan wilayah yang dirumuskan itu luasnya dua kali lipat dari wilayah yang sekarang dicaplok negara-pemukim Zionis. Ia mencakup – dalam penyebutan geografis hari ini – Kerajaan Yordania, (di kedua sisi sungainya), "jalur Gaza", Lebanon Selatan, dan wilayah Selatan hingga Barat Daya Suriah, ditambah sebagian wilayah Palestina yang sekarang sudah diduduki Zionis. Wilayah yang digambarkan ini pun masih jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan rujukan dari kalimat yang terkenal dalam Kitab Injil, yaitu dari Sungai Nil hingga Eufrat – yang diklaim sebagai warisan nasional oleh para "ekstremis" Zionis. Namun,

bahkan jika hanya konsep Palestina minimum yang akan dijadikan sebagai asas perencanaan Zionis, hal itu pun akan membuka jalan menuju perluasan wilayah di masa depan terbuka lebar. Karena tidak lebih dari setengah dari wilayah yang dicita-citakan ini sekarang berada dalam penguasaan negara-pemukim Zionis.

Dua kali sejak pendiriannya negara-pemukim Zionis telah menunjukkan fakta bahwa, sejauh itu mengenai lingkup wilayah, mereka mengikuti *modus operandi* yang oleh Gerakan Zionis telah dijalankan dengan berhasil selama 50 tahun dalam hal pendirian negara dan pengusiran kaum Arab: (1) pada 1948 dan awal 1949, mereka menduduki area yang tidak diperuntukkan bagi "negara Yahudi" dalam rekomendasi Dewan Umum untuk pembagian Palestina – hanya beberapa bulan saja setelah Organisasi Zionis meyakinkan Dewan Umum bahwa mereka setuju dengan wilayah yang "diberikan" bagi "negara Yahudi". Dan, (2) di akhir Oktober hing-

ga awal November, 1956 – mengambil untung dari kesibukan pasukan bersenjata Mesir yang sedang mempertahankan negerinya dari invasi pasukan Inggris dan Prancis – Zionis bergabung dalam persekongkolan tripartit agresif itu dan mengambil kesempatan untuk menduduki "Jalur Gaza" dan sebagian Semenanjung Sinai. Empat bulan kemudian, negara Zionis menolak permintaan berkali-kali dari PBB untuk secepatnya mundur – dengan membela diri bahwa wilayah Palestina dan Mesir yang telah mereka caplok adalah bagian dari "kampung halaman historis" dan "warisan nasional" Zionis.

Tidak hanya dengan perbuatan jahat, tapi juga dengan kata-kata jahat, negara-pemukim Zionis telah menunjukkan niatannya, ketika waktunya tepat, untuk mencaplok wilayah baru yang terbentang dalam cakupan yang mereka klaim sebagai warisan nasional. Perdana Menteri veteran negara Zionis, David Ben Gurion, setidaknya dalam dua kesempatan mengumum-

kan secara khidmat, di dua dokumen resmi negara, bahwa negara telah didirikan "di satu bagian kecil negeri kita"[7], dan "hanya di satu bagian dari Tanah Israel"; dan negara itu sendiri telah mengumumkan bahwa "pembentukan Negara baru bukan berarti mengurangi cakupan historis Eretz Israel."[8]

Mengingat pola perilaku konsisten Gerakan Zionis; mengingat pula konsep tradisional Zionis tentang luas wilayah "Eretz Israel", yang bahkan versi dalam versi "moderatnya" dua kali lebih luas dari wilayah yang telah direbut sejauh ini oleh negara Zionis; dan mengingat peringatan yang jelas, yang disuarakan oleh pemimpin Zionisme yang paling terus terang dan penuh wibawa, yang menyatakan bahwa negara Zionis tidak meninggalkan tekadnya untuk merebut

---

7 State of Israel, *Government Yearbook,* 5712 (1951/1952), Introduction p. x.

8 State of Israel, *Government Yearbook,* 5716 (1955), p. 320.

wilayah Arab yang baru – mengingat semua ini adalah absurd untuk percaya, bahwa Zionisme akan selamanya berpuas diri dengan sebagian kecil wilayah yang, sebagaimana mereka tekankan, dari "warisan nasional", yang bagaimanapun selama ini telah mereka rencanakan untuk kuasai.

Dari tiga elemen pokok program Zionis – pemisahan-diri rasial di negara Zionis, eksklusivitas rasial dan pengusiran kaum Arab, dan penguasaan seluruh wilayah yang disebut "Eretz Israel" – hanya yang ketiga yang belum terwujud. Hal inilah yang menjadi "urusan tak tuntas" Zionisme. Hal ini tak boleh dilupakan sebagai perhatian utama Gerakan Zionis, dan negara Zionis, di masa mendatang. Sebab bagi negara-pemukim Zionis, jika ingin terus ada artinya harus bersiap dan mengupayakan perluasan wilayah.

IV. Respons Rakyat Palestina: Dari Perlawanan ke Pembebasan

Respons rakyat Palestina terhadap ancaman Zionisme telah melalui lima tahapan:

Pertama, pada awalnya – ketika Zionis datang dalam jumlah yang relatif kecil dengan menekankan pada alasan tindakan mereka pada alasan keagamaan dan kemanusiaan, sambil menutup-nutupi karakter politis, ideologis, dan rasis kolonial dari Gerakan mereka – kaum Arab Palestina percaya para imigran ini adalah "peziarah" yang didorong oleh kerinduan keagamaan terhadap Tanah Suci, atau "pengungsi" yang lari dari penganiayaan di Eropa Timur dan mencari keamanan di Palestina. Arab Palestina,

maka itu, memberikan sambutan hangat. Bahkan Herzl mencatat "sikap bersahabat dari penduduk setempat"[9] pada gelombang awal pemukim Zionis.

Kedua, sesaat setelah dilantiknya Gerakan Zionis baru pada 1897, gelombang kedua kolonisasi Zionis mulai berdatangan ke pantai-pantai Palestina (sejak 1907/1908 ke tahun-tahun selanjutnya), sikap bersahabat Arab mulai berganti jadi kecurigaan dan kemarahan. Pengusiran sistematis petani, buruh, dan penjaga Arab dari koloni-koloni baru Zionis, dan pemboikotan sistematis hasil produksi Arab, membangkitkan kemarahan kaum Arab. Namun dimensi politik nasionalis masih ditutup-tutupi dari pandangan kaum Arab: adalah eksklusivitas ras dan praktik keunggulan ras Zionis, yang menjadi pe-

---

9 "Der Baseler Kongress" in Gesammelte Schriften, Berlin, 1920, p. 164. Quoted in Rabinowicz, Oskar, *Fifty Years of Zionism,* London, Robert Anscombe & Co., 1950, p. 31.

nyebab kemarahan Arab. Lantaran penjajahan Zionis masih dalam proporsi yang kecil, rasa permusuhan yang ditimbulkannya masih, sedikit-banyak, bersifat lokal.

Ketiga, persekutuan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis, secara nyata diekspresikan dalam Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, dan pencaplokan Inggris atas Yerusalem pada 9 Desember 1917, akhirnya membuka mata kaum Arab arti sebenarnya dari apa yang terjadi, dan pulang dengan kesadaran bahwa mereka akan terusir jika Zionisme dibiarkan menjalankan rencananya. Massa Palestina secara naluriah kemudian memahami bahwa peristiwa yang terjadi sehari-sehari sebagai kejadian yang mengerikan; dan Palestina akan menjadi tempat perlawanan Arab yang gigih dan tak kenal lelah terhadap persekutuan Inggris dan Zionis.

Kegelisahan yang kemudian timbul setelah diumumkannya Deklarasi Balfour sempat dire-

dam sejenak, oleh jaminan-jaminan menenangkan dari Inggris selama 1918. Sebuah Deklarasi Resmi oleh Pemerintah Inggris (diterbitkan pada 16 Juni 1918) meyakinkan kaum Arab bahwa, sejauh itu mengenai wilayah yang diduduki pasukan Sekutu, "Pemerintah masa depan wilayah-wilayah tersebut akan didasarkan pada prinsip persetujuan dari subjek pemerintahannya. Kebijakan ini akan selalu dipegang oleh Pemerintah Yang Mulia."[10] Dan, hanya empat hari sebelum gencatan senjata, Deklarasi Inggris-Prancis yang diumumkan bersama secara luas (diterbitkan pada 7 November 1918) memberitahukan orang-orang Arab Suriah, Irak, dan Palestina bahwa sudah menjadi niatan dari dua sekutu "untuk memajukan dan membantu pembentukan pemerintahan penduduk asli" dan "untuk mengakui pemerintahan-pemerin-

10 Text in Antonius, George, *The Arab Awakening,* Beirut, Khayats, 1955, pp. 433-434.

tahan tersebut sesegera mungkin setelah terbentuk."[11] Deklarasi-deklarasi ini—meskipun segera saja terbukti ketidaktulusan dan ketidakjujurannya—untuk sementara waktu dapat menenangkan kecemasan rakyat Palestina.

Pada awal 1919, semua mata tertuju ke Paris: Konferensi Damai diharapkan mampu menyelesaikan kontradiksi janji-janji pihak sekutu semasa perang dan membuka era baru sejarah dunia yang telah lama ditunggu-tunggu, yang didasari prinsip penentuan nasib sendiri bangsa, yang Presiden Wilson umumkan dengan nama penuh empati. Namun, ketika harapan itu memudar dan masuknya pemukim Zionis – yang sempat terputus semasa perang – berlanjut, ketakutan orang-orang Arab muncul kembali. Begitu pula dengan perlawanan Arab terhadap ba-

---

11 Text in Antonius, George, *The Arab Awakening,* Beirut, Khayats, 1955, pp. 435-436.

haya ganda pendudukan Inggris yang berlarut dan kolonisasi Zionis yang semakin meluas.

Penentangan Arab Palestina terhadap persekutuan Inggris dan Zionis pertama kali dikemukakan, pada 1919, dalam *perwakilan diplomatik* dan *deklarasi kolektif* kehendak umum rakyat.

Komisi King-Crane Amerika menjadi yakin tentang perasaan yang sebenarnya dari rakyat Palestina. Pada 29 Agustus 1919, Komisi melaporkan:

> "…populasi non-Yahudi Palestina – yang hampir sembilan per sepuluh keseluruhannya–secara tegas menentang seluruh program Zionis… Tidak ada satu hal lain pun yang lebih disepakati oleh penduduk Palestina selain hal ini…"[12]

---

12 Text in Antonius, George, The Arab Awakening, Beirut, Khayats, 1955, p. 449.

Temuan Komisi menguatkan keputusan Kongres Umum Suriah, yang terdiri dari perwakilan terpilih penduduk Palestina, Lebanon, dan Suriah. Sebuah resolusi, yang disahkan dengan suara bulat oleh Kongres pada 2 Juli 1919, mengumumkan:

> "Kami menentang upaya Zionis yang mendirikan Persemakmuran Yahudi di bagian selatan Suriah, yang dikenal sebagai Palestina, dan menentang migrasi Zionis ke bagian mana pun di negeri kami; karena kami tidak mengakui segala embel-embel mereka tetapi menganggap mereka sebagai bahaya besar bagi rakyat kami dari sudut pandang nasional, ekonomi, dan politik. Rekan-rekan Yahudi kita akan menikmati hak dan memikul tanggung jawab yang sama."[13]

---

13 Text in Antonius, George, The Arab Awakening, Beirut, Khayats, 1955, p. 441.

Pernyataan senada yang menolak Zionisme tanpa syarat terus dibuat dalam setiap pertemuan Arab Palestina sepanjang dasawarsa pendudukan Inggris di Palestina. Tidak pernah sekali pun ada kelompok atau konferensi Arab Palestina yang menyatakan penerimaan – walaupun sebagian atau bersyarat – terhadap kolonisasi Zionis. Dan perasaan itu, dengan tegas diungkapkan oleh Komisi King-Crane pada 1919, kemudian terus disampaikan, dengan kemendesakan yang sama, kepada Penguasa Mandat (*Mandatory Government*) dan banyak Komisi-Komisinya, serta juga pada Liga Bangsa-bangsa dan Perserikatan Bangsa-bangsa, oleh setiap utusan dari Palestina yang berkesempatan hadir di forum lembaga-lembaga tersebut.

Namun deklarasi penentangan, meskipun penting sebagai ekspresi kehendak nasional, bukanlah satu-satunya cara perlawanan yang ditempuh rakyat Palestina.

Pada Maret 1920, pertempuran bersenjata pecah antara penduduk desa Arab dan pemukim Zionis di utara Palestina; dan pada April 1920, pertikaian Arab-Zionis terjadi di Yerusalem. Pertikaian-pertikaian ini kemudian diikuti oleh kerusuhan pada 1921, 1929, dan 1933,dan pemberontakan di seluruh negeri pada 1936 yang kemudian terjadi lagi pada 1937 hingga menjelang Perang Dunia Kedua pada 1939. Dan, sejak Desember 1947 hingga mundurnya Inggris yang disusul proklamasi negara-pemukim Zionis pada Mei 1948, Arab Palestina terlibat dalam pertempuran hidup dan mati melawan pasukan Inggris dan penjajah Zionis.

Dengan penolakan terhadap Kolonialisme Zionis yang ditekankan secara berulang-ulang tanpa kenal lelah dan dengan mengorbankan hidup dan tubuh mereka untuk mempertahankan kesucian kampung halaman mereka selama 30 tahun, orang-orang Palestina dari segala lapisan dengan fasihnya bersaksi – dengan kata-kata

dan perbuatan, ditulis dengan tinta dan darah – untuk pengabdian mereka kepada hak-hak nasional mereka dan penolakan tanpa syarat mereka terhadap Zionisasi negeri mereka.

Berbagai cara yang dipilih orang-orang Palestina untuk menyatakan penentangan mereka terhadap persekutuan Kolonialisme Zionis dan Imperialisme Inggris, sejak 1917 hingga 1948, tidak terbatas pada pernyataan dan pemberontakan. Dengan cara yang lebih prosaik – dan barangkali juga lebih sulit dan mahal, Arab Palestina menjawab "Tidak!" tanpa syarat pada penyokong imperialisme dan penjajah rasis sekaligus.

Pada puncak pemberontakan yang terkenal di tahun 1936, rakyat Palestina melancarkan pembangkangan sipil yang berdampak luas, berbarengan dengan pemogokan di seluruh negeri yang bertahan hingga 174 hari (barangkali pemogokan nasional terpanjang dalam sejarah) yang berdampak terhadap semua bisnis,

komunikasi, dan layanan pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Sekalipun harus menanggung biaya yang mahal, laki-laki dan perempuan Palestina bertahan dalam pemogokan, menolak segala upaya dari Penguasa Mandat untuk mengakhirinya, dan tidak berhenti sampai penguasa-penguasa negara Arab tetangga turun tangan dan berjanji untuk memulai perundingan kolektif Arab dengan Pemerintah Inggris demi membenahi keadaan yang menyebabkan nestapa Arab Palestina.

Lebih penting lagi, Arab Palestina menggunakan satu-satunya senjata yang tersisa dalam perjuangan mereka melawan Zionisasi Palestina: jika mereka tidak dapat mengendalikan imigrasi penjajah Zionis ke Palestina, mereka masih memiliki kendali atas penjualan lahan terhadap penjajah-penjajah itu. Senjata ini mereka gunakan tanpa henti selama periode Mandat.

Catatan menunjukkan, selama 30 tahun pendudukan Inggris dan dorongan aktif kolonisasi

Zionis – ketika Zionis diijinkan oleh Penguasa Mandat untuk melipat-gandakan jumlah mereka hingga 12 kali lipat dari tahun 1917, dan ketika rasio Zionis dari total populasi dibiarkan naik hingga sepertiga dari keseluruhan – pertumbuhan lahan yang didapatkan Zionis sangat lambat, sebagai buah dari penolakan Arab menjual tanahnya pada penjajah. Statistik yang diterbitkan Pemerintah Inggris mengungkapkan total area yang diperoleh Zionis dari tahun 1920, ketika pendataan tanah mulai dibuka, hingga pengusiran orang-orang Arab, berada di bawah 4 persen dari total wilayah Palestina.[14] Dari tanah yang diperoleh Zionis ini, sebagian dijual oleh pemilik tanah yang bukan orang Palestina yang tidak ada di tempat, dan sebagian lagi dialihkan kepada pendanaan kolonisasi Zionis oleh Pemerintah Inggris sendiri (domain publik, di mana Pe-

---

14 *Survey of Palestine,* Jerusalem, Government Printer, 1946, p. 243 (paragraph 520).

merintah Mandat dipercaya untuk menjadi wali amanat rakyat Palestina). Pada kenyataannya, seorang juru bicara resmi untuk Agensi Yahudi menyampaikan pada Komisi Inggris bahwa, "dari seluruh tanah yang dibeli orang-orang Yahudi, wilayah yang relatif kecil yaitu tidak lebih dari 10 persen didapat dari para petani."[15]

Keempat, pada 1948, Arab Palestina akhirnya dirampas secara paksa. Kebanyakan rakyat Palestina diusir dari negerinya. Perlawanan mereka yang tak kenal lelah dan pengorbanan mereka yang mahal selama tiga dekade telah gagal mencegah terjadinya bencana nasional.

Namun semua pengorbanan itu tidaklah siasia. Karena mereka telah mengawal hak nasional Palestina dan menggarisbawahi legitimasi pengakuan Arab terhadap warisan nasional. Hak-hak yang tidak dipertahankan adalah hak-

---

15 *British Blue Book* (commonly known as the "Shaw Report"), Cmd. 3530, p. 114.

hak yang dibiarkan untuk dilangkahi. Jika tanpa penentangan dan dituruti, maka perampasan menjadi absah dengan sendirinya. Generasi Palestina yang hidup di masa antara Perang Dunia tidak akan didakwa oleh generasi selanjutnya terkait perampasan warisannya. Mereka memang kalah – tapi tidak tanpa perlawanan. Mereka memang terusir – tapi bukannya tanpa keinginan untuk mempertahankan warisannya.

Rakyat Palestina juga sejak awal tak sudi mengakui penjajahan keji Zionis terhadapnya sebagai sesuatu yang harus mereka terima. Banyak yang telah menunjuk dirinya sebagai penasihat "realisme", yang menganjurkan pengakuan orang-orang Palestina pada *status quo* yang baru dan menerima keterusiran mereka sebagai "karunia"; dan banyak pula tawaran bantuan ekonomi yang menggiurkan untuk "mencari pemukiman lain" dan "rehabilitasi" di luar Palestina. Tapi rakyat Palestina yang tetap bertahan. Selama 30 tahun mereka tak gentar meng-

hadapi kekuatan gabungan Imperialisme Inggris dan Kolonialisme Zionis. Mereka melawan perampasan lahan dan pengusiran jasmani agar jiwanya dapat ditaklukkan. Mereka memahami betul bagaimana harus melawan "godaan-godaan itu".

Negara-pemukim Zionis, karena itu, tetaplah negara perompak. Mereka tak memiliki apa pun yang dapat disebut sebagai keabsahan/legitimasi – karena rakyat Palestina masih tetap setia pada warisan dan hak-haknya.

Kelima, orang-orang Palestina, terlepas semua kesulitan dan kemalangannya, masih memiliki keyakinan yang tak tergerus pada masa depannya

Dan orang-orang Palestina tahu bahwa jalan menuju masa depannya adalah melalui pembebasan tanah airnya.

Dalam keyakinan inilah rakyat Palestina – 16 tahun setelah pengusiran dan keterasing-

annya, masa di mana mereka menaruh harapannya untuk kembali ke negerinya pada itikad dunia dan opini publik Internasional, pada PBB, dan/atau pada negara-negara Arab – akhirnya memilih untuk melakukan inisiatif. Pada 1964, mereka menegaskan kembali persatuannya dengan mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO/ Palestine Liberation Organization).

Hanya melalui pembebasan Palestina, yang dipelopori oleh orang-orang Palestina yang bersedia membayar harganya, pengorbanan tertinggi dari generasi terdahulu dapat dibenarkan secara terhormat dan cita-cita serta harapan orang-orang Palestina yang masih hidup dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Penutup: Pembebasan Palestina

Hak atas *pembebasan nasional* merupakan perpanjangan dari hak sebuah *bangsa untuk mempertahankan diri*, yang tidak hanya dijunjung tinggi oleh Piagam PBB, tetapi juga dinyatakan "melekat" dan tak bisa "dirintangi sebagaimana tertulis dalam ketentuan Piagam itu.[16] Jika melanjutkan penerimaan terhadap hasil suatu makar sama halnya dengan keberlanjutan makar itu sendiri, pembebasan wilayah yang dicaplok dengan agresi adalah perpanjangan dari hak melekat untuk melawan agresi itu sendiri. Pembebasan dan pertahanan diri adalah dua sisi dari hak dasar sama yang tidak dapat dicerabut.

Hak atas pembebasan nasional telah diakui secara universal. Hanya rezim-rezim imperial dan kolonial keras kepala yang masih menggunakan prinsip mitos tak boleh diganggu gugatnya wilayah yang didapatkan melalui pencap-

16 *United Nations Charter,* Article 51.

lokan di masa lalu atau bahkan pencaplokan yang masih berlangsung. Tentu saja tujuannya adalah untuk menghentikan proses dekolonisasi sebelum ombak pasang pembebasan nasional menelan rezim mereka yang menyalahi zaman.

Pelaksanaan hak pembebasan nasional tidak hanya terbatas pada situasi di mana terdapat dominasi asing yang menjadikan sekelompok orang tunduk pada yang lain, atau ketika sumber daya dari suatu kaum dimanfaatkan sepenuhnya oleh kepentingan kaum lain. Pelaksanaan hak atas pembebasan nasional meluas juga – dan dalam keadilan yang lebih besar – pada situasi di mana negeri dari suatu kaum dikuasai oleh kaum lain sambil dikosongkan secara paksa dari penduduknya yang sah.

Nasib tragis Palestina mencakup semua unsur dominasi, eksploitasi, dan perampasan asing ini – dan ditambah lagi hal-hal selain itu. Wilayah Palestina dikuasai oleh asing. Sumber dayanya dijarah oleh pihak lain. Sementara orang-

orang Palestinanya diasingkan dari tanah air mereka. Sisa-sia penduduk Arabnya merana di bawah rezim diskriminasi rasis dan penindasan yang sama kejamnya dengan rezim supremasi ras lain di Asia dan Afrika. Semua ini dapat dicapai berkat Imperialisme, teror, dan kekerasan. Dan tidak satu sisi pun dari ketentuan multidimensi yang telah ditetapkan sebelumnya ini yang dapat diabsahkan, baik secara sengaja maupun melalui kelalaian, oleh kaum Palestina atau sebagian kecil darinya.

Dalam kebulatan tekadnya menempuh jalan terjal pembebasan nasional, rakyat Palestina dibesarkan hatinya oleh kepercayaan akan keadilan yang berulang kali dikemukakan oleh rakyat-rakyat yang baru merdeka dari penjajahan dalam berbagai konferensi internasional. Dari Bandung hingga Accra, dari Kasablanka hingga Belgrade, keyakinan akan terwujudnya keadilan dalam perjuangan Arab Palestina di-

nyatakan dengan jelas.[17] Dan, pada Konferensi Kedua Kepala Negara atau Pemerintahan Non-Blok, "dukungan penuh pada rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan rasisme" dideklarasikan secara khidmat.[18] Para pemimpin tertinggi bangsa-bangsa yang masih menyimpan jelas ingatan pengalaman mereka di bawah imperialisme, kolonialisme, dan/atau rasisme menunjukkan sikap tanggap terhadap penderitaan dan harapan rakyat Palestina, yang masih menanggung derita dari semua kejahatan ini, serta perampasan dan pengusiran. Sikap tanggap semacam itu selalu dapat menambah keyakinan mendalam rakyat Palestina bahwa keadilan, kebebasan, dan martabat manusia pada akhirnya akan menang di tanah airnya.

---

17 See Appendix. [in original document — R. D.]

18 See Appendix. [in original document — R. D.]

Masalah Palestina, sekalipun hanya orang-orang Palestina yang merasakan dampak langsungnya, bukanlah masalah rakyat Palestina sendiri.

Negara-pemukim Zionis, yang berniat melebarkan wilayah, adalah ancaman bagi keutuhan wilayah negara-negara Arab lain. Zionis sudah mencaplok wilayah mereka. Dan masih bercita-cita untuk mencaplok wilayah lainnya.

Sebagai suatu upaya penjajahan, yang secara anomali tumbuh ketika Kolonialisme mulai surut, persoalan ini menjadi tantangan bagi seluruh rakyat Asia dan Afrika yang menentang penjajahan. Lantaran, dalam analisis akhirnya, perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan adalah satu dan tak bisa dipisahkan.

Dan – sebagai sistem rasis yang digerakkan oleh doktrin pemisahan diri rasial, eksklusivitas ras, dan keunggulan ras, yang secara sistematis mengejawantahkan doktrin-doktrin ini dalam

praktik diskriminasi dan penindasan rasial yang kejam – sistem politik yang didirikan oleh Zionis di Palestina seharusnya selalu dilihat sebagai ancaman bagi setiap insan beradab yang mengabdikan dirinya untuk menjaga dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Karena kapan pun dan di mana pun martabat satu orang saja dilanggar, atas nama keyakinan rasisme, saat itu pula dosa keji telah dilakukan terhadap martabat semua orang, di mana pun ia berada.***

Biodata

Fayez Sayegh (1922-1980), adalah akademisi dan diplomat Suriah-Palestina, utusan Misi Kuwait untuk PBB pada pertengahan 1970-an. Pada masa mudanya, Sayegh merupakan anggota penting Syrian Social Nationalist Party (Partai Sosial Nasionalis Suriah), namun kemudian hengkang setelah berselisih pendapat dengan pendiri partai, Antoun Saadeh. Ia kemudian menyelesaikan PhD di bidang Filsafat Eksistensial, di Georgetown University, Amerika Serikat, sebelum kemudian menjabat beberapa posisi akademik dan diplomatik, utamanya di AS.